

TESIS

**ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI
NEGERI (PTN) DAN KOPERTIS MAKASSAR**

***AN ANALYSIS ON BUDGET ABSORPTION IN STATE
UNIVERSITIES AND COORDINATOR OF PRIVATE
UNIVERSITIES (KOPERTIS) OF MAKASSAR***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

ALIMUDDIN



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

TESIS

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN KOPERTIS MAKASSAR

AN ANALYSIS ON BUDGET ABSORPTION IN STATE UNIVERSITIES AND COORDINATOR OF PRIVATE UNIVERSITIES (KOPERTIS) OF MAKASSAR

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**ALIMUDDIN
P3400214403**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

TESIS

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN KOPERTIS MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ALIMUDDIN
P3400214403

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 12 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,


Dr. Tawakkal, S.E., Ak., M.Si., CA

Ketua


Dr. Aini Indrijawati S.E., Ak., M.Si., CA

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi,



Dr. R.A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Abd.Rahman Kadir, SE., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimuddin
NIP : P3400214403
Jurusan / Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya yang berjudul :

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN KOPERTIS MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2018

Yang membuat pernyataan,



Alimuddin

ABSTRAK

ALIMUDDIN. *Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Makassar* (dibimbing oleh Tawakkal, dan Syukri Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini dilaksanakan di perguruan tinggi negeri dan Kopertis Makassar, yaitu Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Pertanian Pangkep, Kopertis Wilayah IX, Politeknik Ilmu Pelayaran, Politeknik Pariwisata, dan Universitas Hasanuddin. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada tujuh puluh responden yang dipilih secara purposif. Data ditabulasi dan dianalisis dengan model regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan 83,1% dari penyerapan anggaran, sedangkan 17,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis dengan tingkat kesalahan 5% menunjukkan bahwa variabel perencanaan pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan administrasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci: penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa, perguruan tinggi



ABSTRACT

ALIMUDDIN. *An Analysis on Budget Absorption in State Universities and Coordinator of Private Universities (Kopertis) of Makassar* (supervised by **Tawakkal** and **Aini Indrijawati**)

The research aimed to determine the effects of planning, administration, human resources, the provision of goods and services, organizational commitment, and regulation on budget absorption.

The research was conducted in state universities and Coordinator of Private Universities (Kopertis) of Makassar, i.e. Ujung Pandang State Polytechnic, Pangkep Agricultural Polytechnic, Coordinator of Private Universities (Kopertis) of Regional IX, Polytechnic of Shipping Science, Tourism Polytechnic, and Hasanuddin University. The research used quantitative method and the data were obtained using questionnaire from 70 respondents selected using purposive sampling technique. The data were tabulated and analyzed using multiple regression model.

The results of regression model indicate that independent variables are able to explain 83.1% of budget absorption, while the rest 17.9% is affected by other factors not under analysis. The result of hypothesis testing with different level of 5% indicates that planning, the provision of goods and services, organizational commitment, and regulation variables are positively and significantly correlated to budget absorption, while administration and human resources variables do not significantly affect budget absorption.

Key words: budget absorption, the provision of goods and services, state universities



PRAKATA

Maha suci Allah yang telah menurunkan rahmatnya kepada manusia. Rintihan kerinduan senantiasa tersenandung dalam qalbu hamba-hamba kepada sang pemilik diri, Allah SWT yang telah mencipta dengan ketulusan cinta-Nya. Shalawat dan salam kepada kekasih-Nya Rasulullah Muhammad SAW, manusia agung yang hidup dalam kesempurnaan cinta-Nya, Ahlulbaitnya, para sahabat dan kepada semua manusia yang telah mendedikasikan dirinya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat izin-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains Akuntansi (M.Ak) pada Program Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Tawakkal, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA, sebagai tim penasehat I dan II, atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi untuk kelancaran penyusunan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati dan cinta kasih, peneliti juga menghanturkan sembah sujud dan terima kasih kepada orang tua: Ibunda Ramlah dan Ibunda Mertua Sitti Amirah, Tak cukup rasanya berucap *Syukron* atas limpahan kasih sayang yang diberikan, dukungan moral dan materil, teladan, serta didikan kepada peneliti dan kemuliaan doa-doa kalian untuk kebaikan penulis "*Jazakumullahu Khairan Katsiran*". Semoga Allah menguatkan peneliti untuk senantiasa berbakti. Kepada saudara tercinta, Sitti Rabita, Zaidah, Nurfaidah, Rosdiana, Wahdania, Nurwatih, Syahrir Djalaluddin, Nurhaeni, Muhammad Rustam, Rosmini, dan Darwis, terima kasih atas dukungan, keceriaan serta kebersamaannya selama ini.

Penyelesaian tesis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rendah hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pasca Sarjana Unhas.
2. Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian studi.
3. Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA., Ibu Dr. Nirwana, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., sebagai penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan untuk perbaikan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen pada Sekolah Pasca Sarjana Unhas yang telah memberikan wawasan keilmuan baru dan pendalaman pengetahuan.
5. Teristimewa kepada Istri Tercinta Rosmala Bire, beserta kelima putra putri tercinta Abdul Baits Humam, Aflah Thufail Humam, Sitti Aqilah Raihana, Ahmad Al-Afif dan Ahmad Al-Akif, pemberi semangat, motivasi dan do'a selama penulis menempuh pendidikan di Unhas.
6. Adik Rahmat Hidayat (Achong) yang senantiasa menjadi tempat berbagi, memberikan dukungan, motivasi, dan bantuannya selama ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan peneliti selama menempuh pendidikan; Akmal Hidayat, SE, Nurhidayah, SE, Hasnur, SE, Veronika Sari Den Ka, S.ST, Taufik, S.ST., Hasnur, SE, Ilham Rahim, SE, Andi Faisal, SE, Isma Lebang, SE, Masuleng, SE, Ghaliyah Immasita, SE.,M.SA atas semua bantuan dan dukungannya, peneliti hanya bisa berdoa semoga menjadi investasi kebaikan kalian di masa depan dan sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak.
8. Teman-teman seperjuangan MAKSI angkatan 2014 beserta pegawai program studi akuntansi dan sekolah pasca sarjana yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini.

9. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga bantuan yang diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, April 2018

Peneliti,

Alimuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Persetujuan.....	ii
HALAMAN Pernyataan.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	15
2.1.1 Teori Institusional	15
2.1.2 <i>Public Finance</i>	16
2.1.3 Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal-Setting Theory</i>).....	17
2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja Pada Perguruan Tinggi	18
2.1.4.1 Penyusunan Program.....	20
2.1.4.2 Perencanaan Kinerja.....	21
2.1.5 Penyerapan Anggaran.....	23
2.1.6 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan	
Anggaran.....	25
2.1.6.1 Faktor Perencanaan.....	25

	2.1.6.2 Faktor Administrasi.....	26
	2.1.6.3 Faktor Sumber Daya Manusia.....	27
	2.1.6.4 Faktor Pengadaan Barang/Jasa.....	29
	2.1.6.5 Faktor Regulasi.....	30
	2.1.6.6 Faktor Komitmen Organisasi.....	31
	2.2 Tinjauan Empiris.....	33
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	37
	3.1 Kerangka Konseptual	37
	3.2 Hipotesis	40
	3.2.1 Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran.....	40
	3.2.2 Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran.....	42
	3.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran.....	44
	3.2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran.....	45
	3.2.5 Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran.....	47
	3.2.6 Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran.....	48
BAB IV	METODE PENELITIAN	50
	4.1 Rancangan Penelitian	50
	4.2 Situs dan waktu penelitian	50
	4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	51
	4.4 Jenis dan Sumber Data	52
	4.5 Metode Pengumpulan data	52
	4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	53
	4.6.1 Variabel Bebas (Independen).....	53
	4.6.1.1 Perencanaan Anggaran.....	53
	4.6.1.2 Administrasi.....	54
	4.6.1.3 Sumber Daya Manusia.....	54
	4.6.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa.....	55
	4.6.1.5 Komitmen Organisasi.....	55
	4.6.1.6 Regulasi.....	56
	4.6.2 Variabel Terikat (Dependen).....	56
	4.7 Instrumen Penelitian	58

	4.8 Teknik Analisis Data	59
	4.8.1 Uji Kualitas Data.....	59
	4.8.1.1 Uji Validitas.....	59
	4.8.1.2 Uji Reliabilitas.....	60
	4.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	60
	4.8.2.1 Uji Normalitas.....	60
	4.8.2.2 Uji Multikolonieritas.....	60
	4.8.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	61
	4.8.3 Uji Hipotesis.....	61
	4.8.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	62
	4.8.3.2 Uji Statistik t	62
BAB V	HASIL	63
	5.1 Gambaran Umum	63
	5.2 Statistik Deskriptif	66
	5.3 Kualitas Data	77
	5.3.1 Validitas	77
	5.3.2 Reliabilitas	81
	5.4 Asumsi Klasik	82
	5.4.1 Normalitas	82
	5.4.2 Multikolinearitas	83
	5.4.3 Heterokedastisitas	84
	5.5 Pengujian Hipotesis dan Ketepatan Model	85
BAB VI	PEMBAHASAN	88
	6.1 Perencanaan Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran	88
	6.2 Administrasi Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran	90
	6.3 Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap penyerapan anggaran	91
	6.4 Pengadaan Barang dan Jasa Berpengaruh Positif terhadap penyerapan anggaran	92
	6.5 Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap penyerapan anggaran	94

6.6	Regulasi Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran	87
BAB VII	PENUTUP	98
7.1	Kesimpulan	98
7.2	Implikasi Penelitian	99
7.3	Keterbatasan	101
7.4	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

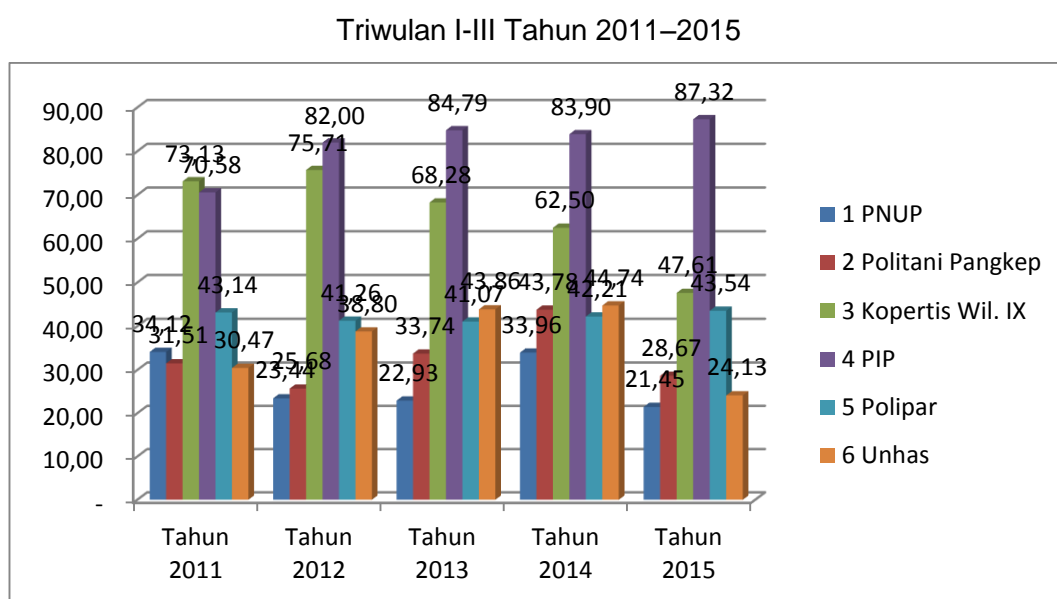
Sejak ditetapkannya Peraturan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara (Susanto, 2006). Untuk itu diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi (Carsidiawan, 2009) mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 17/2003 adalah alat stabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Berdasarkan reformasi penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, telah disyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga (Syakhroza, 2008). Akan tetapi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang mengusung semangat reformasi keuangan negara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adanya keterlambatan penyerapan

dana APBN oleh kementerian negara/lembaga dan satuan kerja di bawahnya masih terjadi. Pada semester I tahun anggaran 2012, pola penyerapan APBN baru dipacu pada semester kedua yaitu tepatnya pada triwulan ke IV. Pada akhir Semester I tahun anggaran 2011, terjadi penyerapan anggaran APBN sebesar 36% yang masih jauh dari kondisi ideal.

Salah satu contoh Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis di Makassar yang realisasi anggarannya masih rendah adalah Politeknik Negeri Ujung Pandang. Bahwa realisasi anggaran triwulan III atau per 30 Juni 2011 realisasi anggaran hanya mencapai 34,12% atau sekitar Rp. 20 Milyar dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 111,2 Milyar. Demikian pula dengan Perguruan Tinggi lain, seperti tertera pada tabel 1 berikut :

Gambar 1.1 Tingkat Penyerapan Anggaran PTN dan Kopertis Makassar



Sumber : LRA tahun 2011-2015 (PTN dan Kopertis Makassar) diolah

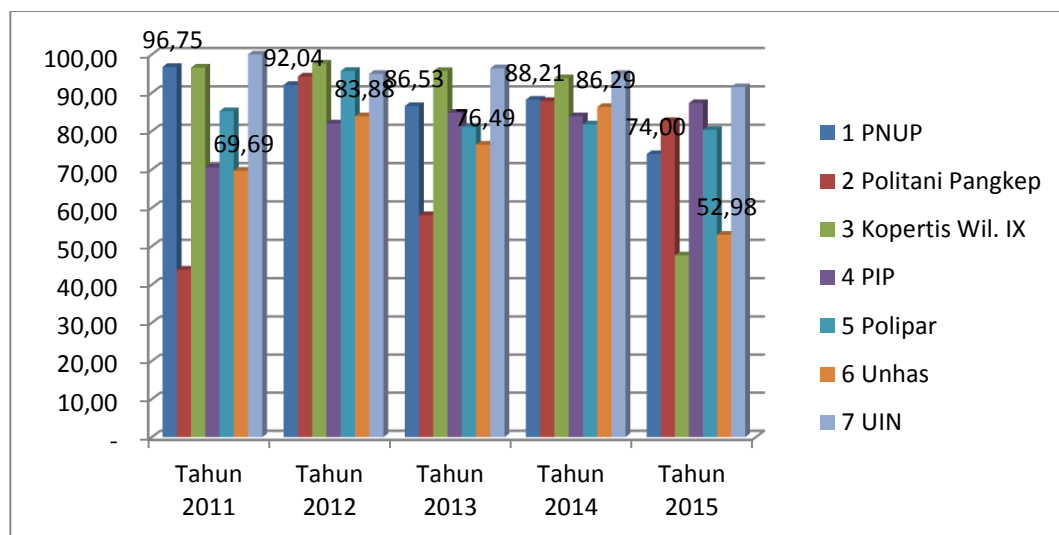
Dari Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa realisasi penyerapan anggaran di PTN dan Kopertis Makassar masih di bawah angka 100% pada Triwulan III. Persentase penyerapan anggaran menunjukkan pola yang tidak proporsional yaitu penyerapan anggaran rendah terjadi di triwulan pertama sehingga

mengakibatkan penumpukan pada triwulan ketiga. Laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran hingga akhir tahun hanya mencapai 81,25%.

Penyerapan anggaran di PTN dan kopertis makassar merupakan prioritas penting yang harus dibenahi. Berbagai data yang menyebutkan bahwa adanya sisa anggaran yang tidak terserap setiap tahun menunjukkan perlu adanya suatu perbaikan di dalam proses penyerapan anggaran tersebut. Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan PTN dan kopertis dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada.

Kondisi penyerapan anggaran di PTN dan Kopertis Makassar, sebagaimana data diperoleh peneliti dari Laporan Realisasi Anggaran masing-masing PTN dan Kopertis dari tahun 2011-2015, dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 1.2 Tingkat Penyerapan Anggaran di PTN dan Kopertis Makassar Tahun 2011-2015



Sumber : Data Diolah

Seperti yang tertera pada Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa gambaran realisasi penyerapan anggaran pada PTN dan Kopertis Makassar berdasarkan data yang peneliti peroleh dari LRA memiliki pola penyerapan anggaran yang masih buruk. Sebagai contoh PNUP, untuk tahun 2011 - 2012 sedikit lebih baik

karena realisasi anggaran mencapai di atas 90%, sedangkan pada tahun 2013-2015 realisasi anggaran kurang dari 90% atau hanya mencapai masing-masing 86%, 88% dan 74% dari total anggaran yang tersedia.

Namun jika dilihat dari perkembangan realisasi penyerapan anggaran dari triwulan I hingga triwulan III hampir semua PTN dan Kopertis Makassar belum mencapai 50 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor perencanaan, faktor proses pengadaan barang dan jasa, dan faktor yang lainnya. Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari PTN dan Kopertis Makassar bahwa penyerapan anggaran hingga triwulan III, dilihat pada tabel 1.3 dan tabel 1.4. Penyerapan anggaran PNUP pada tahun 2011 hanya mencapai 34,12%, tahun 2012 hanya mencapai 23,45%, tahun 2013 hanya mencapai 22,93%, tahun 2014 hanya mencapai 33,96% dan pada tahun 2015 hanya mencapai 21,45%.

Minimnya penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang diharapkan di mana seharusnya realisasi anggaran dapat mencapai diatas 90 persen. Selain rendahnya penyerapan anggaran sebagaimana yang terlihat dalam tabel diatas, di PTN dan Kopertis Makassar juga mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. Persentase penyerapan anggaran dalam lima tahun terakhir membentuk suatu pola yaitu lambat di triwulan pertama dan menumpuk di triwulan empat.

Melihat fenomena ini, penyusun memandang bahwa implementasi berbasis kinerja yang diterapkan didalam suatu perguruan tinggi masih sangatlah minim, sehingga perlu penelitian yang berkelanjutan guna mengetahui kendala apa saja yang terjadi didalam suatu perguruan tinggi ketika menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor

59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. Penerapan anggaran berbasis kinerja di perguruan tinggi tentunya tidak lepas dari kendala yang mungkin dihadapi salah satunya yang telah dikemukakan yaitu pola penyerapan anggaran yang lambat.

Indonesia oleh Bank Dunia dimasukkan sebagai salah satu Negara dengan kondisi penyerapan anggaran *slow and back loaded* yang artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Hal tersebut tergambarkan pada fakta yang telah dikemukakan di paragraf sebelumnya. Dengan penyerapan anggaran yang lambat dan menumpuk dibelakang atau akhir tahun anggaran menyebabkan belanja pemerintah sebagai stimulus penggerak roda perekonomian menjadi tertunda. Permasalahan ini tentunya banyak menarik minat dari kalangan akademisi untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

Herriyanto (2012) dan Ridani (2015) telah melakukan tinjauan empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran di pemerintah daerah yang menggunakan APBD. Hasil penelitian yang dilakukan, secara garis besar, menunjukkan bahwa faktor perencanaan, administrasi, sumber daya manusia (SDM), dokumen pengadaan, pelaksanaan anggaran, komitmen

organisasi, pengendalian internal, regulasi, dan Ganti Uang Persediaan (GUP) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pada penelitian ini tidak melibatkan variabel pengendalian internal dan ganti uang persediaan (GUP). Pengendalian internal pada pemerintahan merupakan proses yang kontinu untuk meyakinkan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP 60/2008) sehingga tidak terkait langsung, secara teknis, dengan penyerapan anggaran. Untuk penggantian uang persediaan (GUP) merupakan dana UP yang diisi kembali (*Revolving*) dari KPPN selaku kuasa BUN kepada rekening bendahara pengeluaran, secara otomatis dari pertanggungjawaban yang diajukan setiap bulan. Jumlah total dari SPM GUP ini merupakan akumulasi dari jumlah bukti pembayaran/kuitansi yang dihasilkan dari UP normal. Pengajuan permintaan pembayaran GUP ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran setiap bulannya. Secara langsung memengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja karena merupakan suatu kegiatan rutin bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran sehari-hari seperti belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, tagihan air /listrik/telepon, konsumsi dan lain-lain namun peneliti tidak membahas secara khusus dalam penelitian ini. Oleh karena itu variabel yang digunakan sebagai prediktor penyerapan anggaran adalah perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi.

Proses perencanaan pada anggaran merupakan tahap awal untuk mengalokasikan sumber daya atau anggaran yang dimiliki. Untuk lebih mengoptimalkan perencanaan penyerapan dana oleh satuan kerja (satker) pengguna anggaran maka pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor

192/PMK.05/2009 tentang perencanaan kas. PMK tersebut memberikan pedoman kepada pengguna anggaran dalam melakukan perencanaan penarikan dana. Dengan adanya perencanaan yang baik diharap dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran satker.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, perbaikan bisnis proses, penataan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama berhubungan dengan proses penyerapan anggaran. Usaha nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain diberlakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang lebih baik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan yang mencakup aspek kecepatan, transparansi dan tanpa biaya, baik dari segi prosedur maupun waktu dengan sentuhan teknologi informasi untuk mendukung proses percepatan, sehingga memperoleh hasil layanan yang lebih efektif dan efisien. SOP tersebut menggunakan sistem *one stop service*, bahwa berbagai pelayanan kepada customer hanya dilayani di *from office*. Pada KPPN penyelesaian SP2D yang sebelumnya diselesaikan dalam 8 jam kerja (satu hari), sekarang paling lama diselesaikan dalam waktu satu jam. Sementara itu pada Kanwil Perbendaharaan, proses penelaahan dan pengesahan penerbitan DIPA paling lama 5 (lima) hari kerja, pengesahan revisi DIPA paling lama 3 (tiga) hari kerja, persetujuan dispensasi tambahan uang persediaan (TUP) paling lama 7 hari kerja. Sebelumnya, tidak ada kepastian dalam penyelesaian dokumen tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres No. 04 tahun 2015 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai upaya mempercepat pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement (E-Proc)*, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukan *E-Proc* memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran.

Hasil penelitian Shah dkk. (2007), Herriyanto (2012), Sulaiman dkk. (2012), Albulescu dan Goyeau (2013) menunjukkan bahwa perencanaan berhubungan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Namun penelitian Putri (2014) menyimpulkan hal berbeda bahwa kegiatan perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Gie, 1980). Administrasi pada proses anggaran merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran terutama karena adanya kesalahan *input* informasi ataupun perubahan regulasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor administrasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Tatar, 2010. Herriyanto, 2012). Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara

administrasi terhadap penyerapan anggaran (Priatno, 2013. Putri, 2013. Fitriani dkk., 2015).

Sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Amiruddin, 2009). Temuan Arif (2013), secara kualitatif, menguraikan keterkaitan antara kapasitas SDM dan penyerapan anggaran. Tinjauan empiris lainnya dilakukan oleh Tatar (2010), Zaman dan Cristea (2011), Herriyanto (2012), Putri (2014), Solikhin (2014), Ridani (2015), dan Fitriani dkk. (2015) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran. Akan tetapi terdapat pula penelitian yang menyimpulkan berbeda bahwa penyerapan anggaran tidak bergantung pada sumber daya manusia (Priatno, 2013. Alumbida dkk., 2016).

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010:263). Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Kuswoyo, 2011. Priatno, 2013. Nugroho, 2013).

Komitmen organisasi merupakan keinginan anggota untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Sopiah, 2008). Arif dan Halim (2013) pada penelitiannya terkait penyerapan anggaran menyimpulkan bahwa komitmen organisasi yang lemah dari eksekutif maupun legislatif merupakan salah satu penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Temuan tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Ridani (2014) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada penyerapan anggaran adalah regulasi yang merupakan pedoman untuk melakukan segala aktivitas baik dalam pengelolaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Penelitian Zaman dan Cristea (2011) menyimpulkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian serupa yang dilakukan oleh Solikhin (2014) dan Ridani (2015). Akan tetapi pada sisi lain regulasi juga menjadi penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif 2013).

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu teori institusional dan *public finance* dengan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) sebagai penunjang untuk menjelaskan fenomena terkait proses dan penyerapan anggaran. Menurut Bastian (2010:193), anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran merupakan wujud realisasi tanggung jawab institusi pemerintahan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya menyediakan kebutuhan masyarakat (publik) menggunakan dana dari masyarakat. Penyerapan anggaran merepresentasikan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan.

Dalam perkembangannya konsep penganggaran senantiasa mengikuti tuntutan zamannya. Olehnya itu, penelitian ini ingin menguji kembali dengan berfokus pada isu terkait penyerapan anggaran belanja pemerintah. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. Hal ini didasari oleh bahwa Perguruan Tinggi sebagai organisasi pelayanan publik yaitu berupa penyedia jasa pendidikan yang mengutamakan pada pelayanan bukan pada pencarian keuntungan semata. Terlebih lagi

sekarang bahwa Perguruan Tinggi itu sudah menjadi pola PK-BLU (Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum).

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengelaborasi hasil penelitian terdahulu dan menganalisis kembali faktor-faktor terkait penyerapan anggaran dengan menggunakan variabel perencanaan, komitmen organisasi, kompetensi SDM, administrasi, proses pengadaan barang/jasa, serta regulasi terhadap penyerapan anggaran di Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis sebagai pengguna APBN. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disusun maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran?
- b. Bagaimana pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran?
- c. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran?
- d. Bagaimana pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran?
- e. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran?
- f. Bagaimana pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran.
- b. Pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran.
- c. Pengaruh SDM terhadap penyerapan anggaran.
- d. Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.
- e. Pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran.
- f. Pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja PTN dan Kopertis terutama kaitannya dengan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang

memengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di PTN dan Kopertis Makassar melalui pengisian kuisioner pada beberapa bagian yang terkait dengan pengelolaan anggaran.

Peneliti memfokuskan analisis faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran dengan menggunakan faktor perencanaan yang difokuskan pada dokumen perencanaannya, faktor administrasi yang difokuskan pada pencatatan administrasinya, faktor sumber daya manusia yang difokuskan pada kompetensi sumber daya manusianya, faktor pengadaan yang fokus pada proses pengadaan baran/Jasa, faktor komitmen organisasi dan faktor regulasi yang fokus pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini memfokuskan penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2011-2015 di PTN dan Kopertis Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang teori dan konsep serta kajian terhadap penelitian terdahulu. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkajinya dari beberapa sumber baik penelitian-penelitian terdahulu sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan tentang kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini

menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan tentang rancangan penelitian, Situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, Variabel penelitian, Instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V Hasil penelitian, menguraikan tentang deskripsi data, dan deskripsi hasil penelitian. Bab ini menjelaskan tentang penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI Pembahasan, bab ini menguraikan pembahasan atas hasil penelitian dimana dihubungkan dengan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori yang mendukungnya.

Bab VII Penutup, menguraikan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan. Saran berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan uraian terakhir dari tesis yang dapat menjadi penuntun bagi penelitian selanjutnya dengan adanya implikasi penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Institusional

Kesadaran akan adanya keterkaitan antar institusi menjadi pemantik para pemikir sosial untuk mencetuskan teori institusional. Max Weber (1922) mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis dan menarik suatu fenomena bahwa terdapat faktor politik terkait dengan penyelenggaraan negara (Alumbida, 2016). Temuan Weber tersebut kemudian dikembangkan Selznick (1948) dan Di Maggio dan Powell (1983) dengan menegaskan teori institusional sebagai antitesa dari teori ekonomi dan kontingensi yang sangat rasional yaitu dengan menjelaskan struktur dan fungsi organisasi dengan ukuran efisiensi tanpa melihat ada faktor lain yang berpengaruh.

Teori institusional berdasarkan pada suatu premis bahwa suatu institusi atau organisasi terbentuk karena adanya tekanan lingkungan institusional sehingga menyebabkan institusionalisasi. Di Maggio dan Powell (1983) menguraikan bahwa organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional di sekitar mereka yaitu mencakup ide-ide yang berpengaruh diinstitutionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir kemudian dilegitimasi melalui perangkat negara melalui suatu pernyataan tertulis. Teori institusional hadir sebagai dalil bahwa unsur struktur internal organisasi dimunculkan oleh lingkungan institusional khususnya oleh negara yang memaksakan adanya pemenuhan atau penyesuaian (Di Maggio dan Powell, 1983). Teori institusional merupakan teori yang relevan untuk memahami organisasi sektor publik (Bealing dkk. *dalam* Juliani, 2014).

Pemasukan APBN Indonesia utamanya bergantung pada penarikan pajak terhadap kegiatan masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan penganggaran. Indonesia menganut sistem *trias politica* yang menempatkan legislatif sebagai perwakilan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Legislatif kemudian membebaskan aspirasi tersebut kepada eksekutif sebagai pelaksana anggaran melalui legitimasi terhadap RAPBN melalui undang-undang. Oleh karena itu institusi penyelenggara anggaran perlu memperhatikan kondisi internal organisasi dengan membentuk suatu komitmen terhadap organisasi (Selznick, 1948) dan kondisi eksternal terutama aturan atau norma yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan institusi.

2.1.2 Public Finance

Musgrave (1959) merumuskan terma *public finance* (keuangan publik) sebagai suatu ilmu atau alat analisis untuk mempelajari aktivitas ekonomi pemerintah. Pandangan lainnya diberikan oleh Carl C. Plehm yang memberi penjelasan lebih spesifik bahwa keuangan publik merupakan ilmu tentang penggunaan dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah (Jaelani, 2015). Keuangan publik mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Rossen, 2002) dengan pendekatan analisis positif dan normatif.

Analisis positif menekankan pada sebab-akibat dari permasalahan keuangan publik sedangkan analisis normatif lebih kepada permasalahan etika dalam keuangan publik (Jaelani, 2015). Oleh karena itu Rossen (2002) menilai bahwa keuangan publik terkait dengan fungsi mikro-ekonomi pemerintah yaitu bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi-alokasi sumber dan

distribusi pendapatan namun tidak terlepas dari fungsi makroekonomi pemerintah terkait penerimaan dan penggunaan pajak dan kebijakan moneter.

Rossen dan Gayer (2008:2-5) menyimpulkan ruang lingkup kajian public finance meliputi pengeluaran negara (*government expenditure*), sumber penerimaan negara dengan pajak sebagai sumber utama (*government revenues and taxes*), pinjaman negara dan pelunasannya (*government borrowing and indebtedness*), administrasi fiskal atau teknik fiskal (*fiscal administrative or technique*), perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*intergovernment fiscal relationship*), dan kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Salah satu intisari pandangan Rossen dan Gayer ialah fungsi keuangan publik dalam melakukan pengeluaran publik melalui pengadaan barang dan jasa (barang publik). Oleh karena itu teori public finance dianggap relevan untuk menjelaskan faktor yang berperan pada penyerapan anggaran pemerintah.

2.1.3 Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan (*Goal-Setting Theory*), merupakan penetapan sasaran (*goal*) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi, sehingga setiap pegawai akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau kelompok sehingga akan meningkatkan ketepatan anggaran (Kusuma,2013). Komitmen untuk mencapai tujuan dapat ditimbulkan dari partisipasi anggota dalam menentukan tujuan organisasi (Locke, 1968). Locke (1968) mengemukakan bahwa komitmen terhadap tujuan merupakan derajat komitmen individu untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan aspek kunci dari teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*). Menurut Indaryanto (2008) untuk mendapatkan tingkat motivasi yang tinggi dari para pegawai, hendaknya dipertanyakan apakah tujuan telah dimengerti oleh semua anggota, apakah

tujuan yang dicapai telah cukup jelas, sehingga proses partisipatif dan program *management by objective* (MBO) dapat berjalan dengan baik.

Latham, *et al* (2008) menemukan bahwa *goal-setting theory* berpengaruh pada kinerja pegawai dalam organisasi publik. Salah satu bentuk nyata dari penerapan *goal-setting* ini adalah anggaran. Sebuah anggaran tidak hanya mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, tetapi juga mengandung sasaran yang spesifik yang ingin dicapai organisasi. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, temuan utama dari *goal setting theory* adalah bahwa orang yang diberi tujuan yang spesifik, sulit tapi dapat dicapai, memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang mudah dan spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memiliki kemampuan yang cukup, menerima tujuan yang ditetapkan dan menerima umpan balik yang berkaitan dengan kinerja (Latham *et. al* 2008).

2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja pada Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi sebagai sebuah Institusi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi terikat pada tugas mulia menyelenggarakan pendidikan seperti dirumuskan dalam UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 pasal 1 yaitu "usaha sadar dan terecana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan Tinggi berfungsi atau memiliki misi untuk mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak dan kepribadian manusia melalui

pelaksanaan (PP 17 tahun 2010); (a) darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga, (b) darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan mengadopsi dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga, (c) darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Walapun keberadaan Perguruan Tinggi adalah organisasi nirlaba (UU RI No 20 tahun 2003 pasal 53) namun Perguruan Tinggi bertanggung jawab mengelola program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan (UU RI No 20 tahun 2003 pasal 50) yang meliputi (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (b) Rencana Strategis (c) Rencana Kerja Tahun (d) Anggaran Pendapatan dan belanja tahunan Perguruan Tinggi (e) Peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan (f) Peraturan pimpinan perguruan tinggi lainnya (UU RI No 20 tahun 2003 pasal 51).

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*). Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dengan demikian Anggaran berbasis kinerja harus (a) Melakukan identifikasi secara tepat *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh suatu program (b) Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai.

Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program Perguruan Tinggi yang disusun dapat mengarah kepada :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Diperoleh hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Tercapainya efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan untuk mewujudkan kesinambungan dan kemandirian organisasi.
4. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk menyusun Anggaran Berbasis Kinerja dibutuhkan standarisasi dan penyusunan program dan aktifitas serta perencanaan kinerja.

2.1.4.1 Penyusunan Program

Merupakan kumpulan kegiatan untuk menghasilkan suatu keluaran dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada PP No 17 tahun 2010, maka Perguruan Tinggi memiliki 3 program utama yaitu (a) Pendidikan; (b) Penelitian; dan (c) Pengabdian kepada masyarakat atau digabung menjadi satu program yaitu Akademik. Program utama tersebut dapat dilengkapi dengan program lainnya, yaitu (a) Pembinaan Kemahasiswaan; (b) Pengelolaan Sumber Daya; dan (c) Pelayanan. Setelah dilakukan pengelompokan program, maka ditentukan aktifitas dan Subaktifitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung program. Rumusan tersebut sebaiknya mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengingat bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91) dengan menggunakan Standar Nasional

Pendidikan (pasal 3) dan pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

2.1.4.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja Perguruan Tinggi yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja akan membantu Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Bagian penting dalam penyusunan ABK adalah menetapkan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja. Oleh karena aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap unit/ satuan kerja dilingkungan Perguruan Tinggi, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unit.

Indikator kinerja dapat ditetapkan berdasarkan Input (masukan), Output (keluaran), Efisiensi, Kualitas atau Hasil (Outcome).

1. Masukan (*input*)

Ukuran masukan ini berguna dalam rangka memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan pengetahuan, hasil penelitian, karya pengabdian kepada masyarakat, kegiatan atau pelayanan. Misalnya, Jumlah jam mengajar dosen, lama kegiatan penelitian.

2. Keluaran (*output*)

Indikator keluaran (*output*) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan. Indikator tersebut diidentifikasi dengan banyaknya tulisan ilmiah dosen/mahasiswa, Jumlah lulusan, mahasiswa yang melakukan daftar ulang.

3. Efisiensi (*Efficiency*)

Indikator ini berguna untuk memonitor hubungan antara jumlah yang diproduksi dengan sumber daya yang digunakan. Ukuran efisiensi menunjukkan perbandingan input dan output dan sering diekspresikan dengan rasio atau perbandingan.

Mengukur efisiensi dapat dilihat dari sisi input atau output, misalnya (a) Biaya yang dikeluarkan per mahasiswa (b) biaya yang dikeluarkan persatuan program studi atau (c) Jumlah lulusan persemester (b) jumlah karya penelitian mahasiswa persemester

4. Kualitas (*Quality*)

Ukuran kualitas digunakan untuk menentukan apakah harapan para stakeholder dari lingkungan internal atau eksternal sudah dipenuhi. Bentuk harapan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan akurasi, memenuhi aturan yang ditentukan, ketepatan waktu, dan kenyamanan, seperti (a) Persentase jumlah keluhan mahasiswa (b) Mahasiswa daftar ulang tepat waktu (c) Kecepatan akses Informasi

5. Hasil (*outcome*)

Indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari *output* suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi keinginan para stakeholder yang dituju, misalnya (a) Lama waktu menunggu mendapatkan pekerjaan pertama.

Permasalahannya seringkali tujuan tersebut tidak dalam kendali satu unit kerja, misalnya program pelayanan daftar ulang berkaitan dengan kinerja Unit kerja yang menangani langsung registrasi, unit kerja Fakultas/ Program Studi yang menangani Kurikulum dan Dosen, unit kerja yang mendukung sistem Informasi.

2.1.5. Penyerapan Anggaran

Sejak tahun 2005, sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu satker menjadi tolak ukur kinerja dari satker tersebut.

Menurut Noviwijaya dan Rohman (2013), penyerapan anggaran satuan kerja adalah “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana dan/atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (*Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda, 2011*). Hingga saat ini pemerintah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategori mengalami keminiman penyerapan

anggaran. Namun beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh kepala satker, bahwa suatu pemerintah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total anggaran yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013).

2.1.6 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran

2.1.6.1 Faktor Perencanaan

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Sedangkan menurut Wijdjaya, (1987:88), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan penganggaran berkaitan dengan tujuan organisasi, alokasi tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab pelaksanaannya (Shah *et. al* 2007). Oleh karena itu, kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Faktor dari kurang baiknya perencanaan

penyusunan anggaran yang berimbas pada program kerja suatu instansi pemerintah.

Arif dan Halim, 2013 menjelaskan bahwa aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran. Penelitian Herriyanto (2012) juga menemukan bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Persiapan dokumen perencanaan anggaran bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan dokumen pembangunan nasional strategis yang menyeluruh yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan anggaran (Hovart, 2005).

Glennard dan Maina (2007) mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia disebabkan oleh terpecahnya proses perencanaan dan alokasi keuangan karena lemahnya kapasitas perencanaan di semua tingkatan dalam sistem. Pendekatan *top-down* yang diterapkan di tingkat pusat tanpa kejelasan peran dan tanggung jawab, arahan yang tidak tepat dan komunikasi yang buruk menyebabkan ketidakpastian dan menghambat proses perencanaan bagi Instansi Pemerintah. Kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi manajemen.

2.1.6.2 Faktor Administrasi

Secara terminologi "Administrasi" adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran *an* pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab

yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apabila pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya (Ali, (2012:19)). Mengurus dan pengurusan diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan.

Gie (1980) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

Herriyanto (2012), Administrasi merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Adapun faktor yang dimaksud adalah : 1) Salah dalam penentuan akun; 2) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek; 3) Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat; 4) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran; 5) Adanya tambahan pagu karena adanya anggaran biaya tambahan (ABT), tambahan luncluran PHLN/PHDN, penerima hibah.

2.1.6.3 Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya adalah bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas dan lain-lain. Menurut Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi

dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Sumber Daya Manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat: (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan; (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Disetiap Instansi Pemerintah harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas-tugasnya. Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat (Hovart, 2005).

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Untuk membentuk aparatur yang sempurna diperlukan upaya peningkatan manajemen pegawai negeri sipil yang diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia (Undang-undang No. 43 Tahun 1999).

Keterampilan individu juga menjadi nilai tambah bagi seseorang. Keterampilan individu seorang PNS mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu. Hal ini diterima secara luas bahwa staf berpendidikan tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembauran dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal yang

tersedia (Caloghirou, (2004) dan Vinding, (2000) dalam Vega, (2007)). Dengan kata lain, perusahaan dengan karyawan yang berpendidikan tinggi dan terlatih akan memiliki kemampuan merealisasikan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM untuk mengelola anggaran. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik. Kualitas SDM yang rendah akan berpotensi menghambat pelayanan administrasi, contohnya bagian keuangan dalam pembuatan SPM dan panitia pengadaan barang dan jasa dalam melakukan proses pelalangan.

Herriyanto. (2012), Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan alternatif solusi kebijakan, adalah : 1) memberikan reward berupa honorarium yang lebih besar dari honorarium yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk mendorong motivasi; 2) Memberikan dorongan motivasi berupa penghargaan baik berupa materi maupun inmateri.

2.1.6.4 Faktor Pengadaan Barang/Jasa

Teori kontijensi berdasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi penerapan sistem baru tersebut bergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Penerapan ULP sebagai sistem yang beroperasi memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pada pengadaan barang dan jasa dituntut

lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya agar meminimalisir serapan belanja daerah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan konstruksi merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik (Bastian, (2010:263). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah (yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan dan/atau diawasi sendiri oleh Instansi sendiri atau oleh kelompok masyarakat. Pengadaan melalui penyedia barang adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Ketentuan mengenai jenis barang, metode pengadaan, serta besaran nilai pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (telah direvisi dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik.

2.1.6.5 Faktor Regulasi

Regulasi atau peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Bastian, 2010:33). Menurut Kaharuddin (2011) regulasi dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengeolaan keuangan negara/daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturarn presiden, peraturanmenteri dan aturan hukum lainnya. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada.

Tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai.

2.1.6.6 Faktor Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Sopiah, 2008).

Mathis dan Jackson (2006) mendefinisikan komitmen organisasi adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Komitmen organisasi ditandai dengan adanya: (1) kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi; (2) kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi; (3) keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi (Sopiah, 2008). Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Mowday *et al.* (1979) mengemukakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah :

- a. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
- b. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
- c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain :

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	Metode/Alat Analisis	HASIL PENELITIAN
1	Arif (2013)	Faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan APBD kab/kota di Provinsi Riau.	Deskriptis kualitatif – Strategi <i>multiple cases</i> .	Faktor kapasitas SDM, regulasi, tender. Dan lambatnya pengesahan APBD merupakan faktor-faktor yang mendominasi penyebab minimnya penyerapan anggaran.
2	Sulaiman dkk (2012)	Anggaran di Kementerian Keuangan RI dan Faktor-faktor yang memengaruhi	Analisis faktor (Exploratory factor analysis)	Faktor yang berpengaruh adalah perencanaan yang tidak matang; pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal; Prosedur pelaksanaan yang menghambat; dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
3	Priatno (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar	Eksploratif - kuantitatif	Faktor perencanaan dan factor pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
4	Albulescu dan Goyeau (2013)	<i>Absorption of EU funds and the economic growth in member countries of the European Union</i>	Analisis Data panel	Faktor utama yang memengaruhi tingkat penyerapan dana uni eropa. Persiapan proyek, sistem pelaksanaan, monitoring dan audit proyek, lemahnya perencanaan, masalah kelembagaan dan korupsi.
5	Putri (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	analisis regresi linear berganda -	Faktor kompetensi sumber daya, dokumen pengadaan, dokumen perencanaan

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	Metode/Alat Analisis	HASIL PENELITIAN
		nggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu	Kuantitatif	berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
6	Herriyanto (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satu kerjalingku ppembayaran KPPN Blitar	Analisis faktor (Exploratory factor analysis)	5 faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan, administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dokumen pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan (GUP).
7	Kuswoyo (2011)	Faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satu unit kerja di wilayah KPPN Kediri	analisis regresi linear berganda - kuantitatif	4 faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran diantaranya adalah faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal satker
8	Ridani (2015)	Analisis penyerapan anggaran belanja daerah di kabupaten ulungan	Metode kualitatif dan kuantitatif - analisis faktor eksploratif	7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu : 1) pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor, 2) penganggaran, 3) komitmen organisasi, 4) pengendalian dan pengawasan internal, 5) kompetensi SDM pengadaan, 6) kompetensi SDM pengelola keuangan, dan 7) regulasi
9	Miliasih (2012)	Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satu unit kerja kementerian negara/ lembaga TA 2010 di Wil. pembayaran KPPN Pekanbaru	Analisis faktor (Exploratory factor analysis)	Dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja
10	Manasan dan Mercado	<i>factors causing low budget</i>		Ada tiga faktor yang menyebabkan

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	Metode/Alat Analisis	HASIL PENELITIAN
	(2001)	<i>absorption in the philippines</i>		rendahnya serapan belanja suatu kementerian di filipina yaitu faktor kelemahan struktural dan sistemik kementerian, faktor sistem penganggaran, dan faktor kesalahan dengan institusinya.
11	Fitriani <i>et. al</i> (2015)	<i>Exploring the factors that impact the accumulation of budget absorption in the fiskal year 2013 “ case study in pekalongn city of central java indonesia</i>	Analisis faktor - Kualitatif	Enam faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran , yaitu : 1) Perencanaan anggaran , 2) Pelaksanaan Anggaran , 3) internal dari unit kerja , 4) Sumber daya manusia (SDM) , 5) Dokumen , dan 6) Administrasi
12	Nugroho (2013)	Faktor-faktor yg memengaruhi penyerapan anggaran setker di KPPN Blitar dgn analisis faktor dan regresi logistik		Faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran, yaitu faktor perencanaan dan faktor pengadaan barjas memunyai pengaruh yg signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja.
13	Priatno (2013)	faktor-faktor yang memengaruhipenyerapanang garanpadasatuankerjalingkup pembayaran KPPN Blitar.	- Analisis Faktor dan Regresi Logistik	2 faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran diantaranya adalah factor perencanaan serta faktor pengadaan barang dan jasa
14	Solikhin (2014)	Meneliti kecenderungan penumpukan belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran dan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pada satker di Wilayah KPPN Purwokerto	Analisis data dengan analisis tematik (kualitatif)	Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barjas, SDM, dan regulasi pengelolaan keuangan. Faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan anggaran
15	Tatar (2010)	<i>Estonian local government absorption capacity of</i>	Kualitatif berdasarkan	Faktor yang mempengaruhi kapasitas penyerapan Pemdadi Estonia terhadap dana

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	Metode/Alat Analisis	HASIL PENELITIAN
		<i>European Union Structural Funds</i>	persepsi Pegawai Pemda di Estonia	Uni Eropa adalah lemahnya administrasi (utamanya kurangnya SDM yang kompeten, administrasi tender) dan kemampuan keuangan tingkat Pemda
16	Zaman, G. and Cristea, A. 2011	<i>EU Structural Funds Absorption in Romania: Obstacles and Issues.</i>	Analisis kualitatif (observasi) dan statistik diskriptif.	<p>Faktor-faktor penyebab lemahnya penyerapan dana Uni Eropa di Romania adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran (SDM, keterbatasan dana, keterlambatan sosialisasi ke masyarakat dan masalah lahan proyek). 2. Proses peluncuran aplikasi proyek (pengumuman pengadaan)- kurangnya strategi jangka menengah dan jangka panjang, keterlambatan panduan pengadaan dan belum sesuai undang-undang. 3. Proses pemilihan proyek dan kontraktor (birokrasi, kondisi alam, kemampuan kontraktor, regulasi, kompleksitas prosedur dan kemampuan SDM)

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Teori intitusional merumuskan bahwa suatu institusi pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi internal terkait komitmen terhadap organisasi (Selznick, 1948) dan kondisi eksternal utamanya terkait norma yang berlaku di masyarakat (Di Maggio dan Powell, 1983). Kondisi internal dan eksternal tersebut akan memengaruhi peran institusi pemerintah dalam sektor keuangan publik sebagaimana dijabarkan pada teori *public finance* oleh Rossen (2002) yaitu untuk menjalankan fungsi mikro-ekonomi dengan mengatur alokasi sumber dan distribusi pendapatan serta fungsi makro-ekonomi terkait penerimaan/ penggunaan pajak dan kebijakan moneter. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka diperlukan perencanaan anggaran yang baik. Teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*) mengemukakan bahwa pemahaman terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi publik akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Latham et. al, 2008). Penyerapan anggaran yang tinggi sebagai suatu tujuan kegiatan penganggaran menuntut adanya kinerjanya yang dilandasi oleh komitmen tinggi terhadap organisasi sehingga proses penyerapan anggaran berlangsung optimal.

Perencanaan sangat erat hubungannya dengan penyerapan anggaran karena kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah (Shah et. al, 2007). Faktor administrasi, SDM, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi juga sangat memengaruhi keberhasilan penyerapan anggaran instansi pemerintah. Faktor

yang tidak kalah penting berpengaruh pada penyerapan anggaran adalah regulasi yang merupakan pedoman untuk melakukan segala aktivitas baik dalam pengelolaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

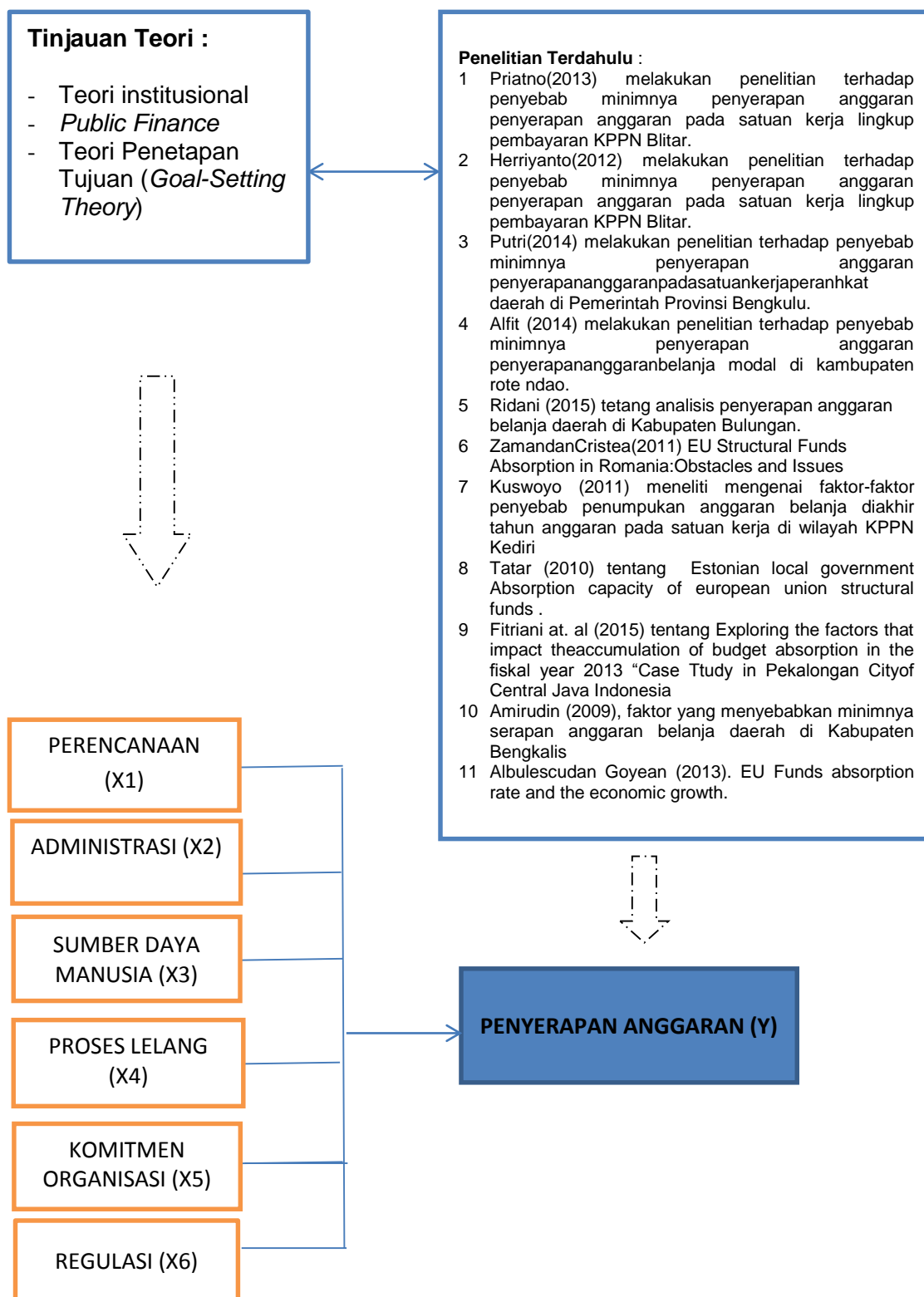
Penyerapan anggaran merepresentasikan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Adamy, 2010).

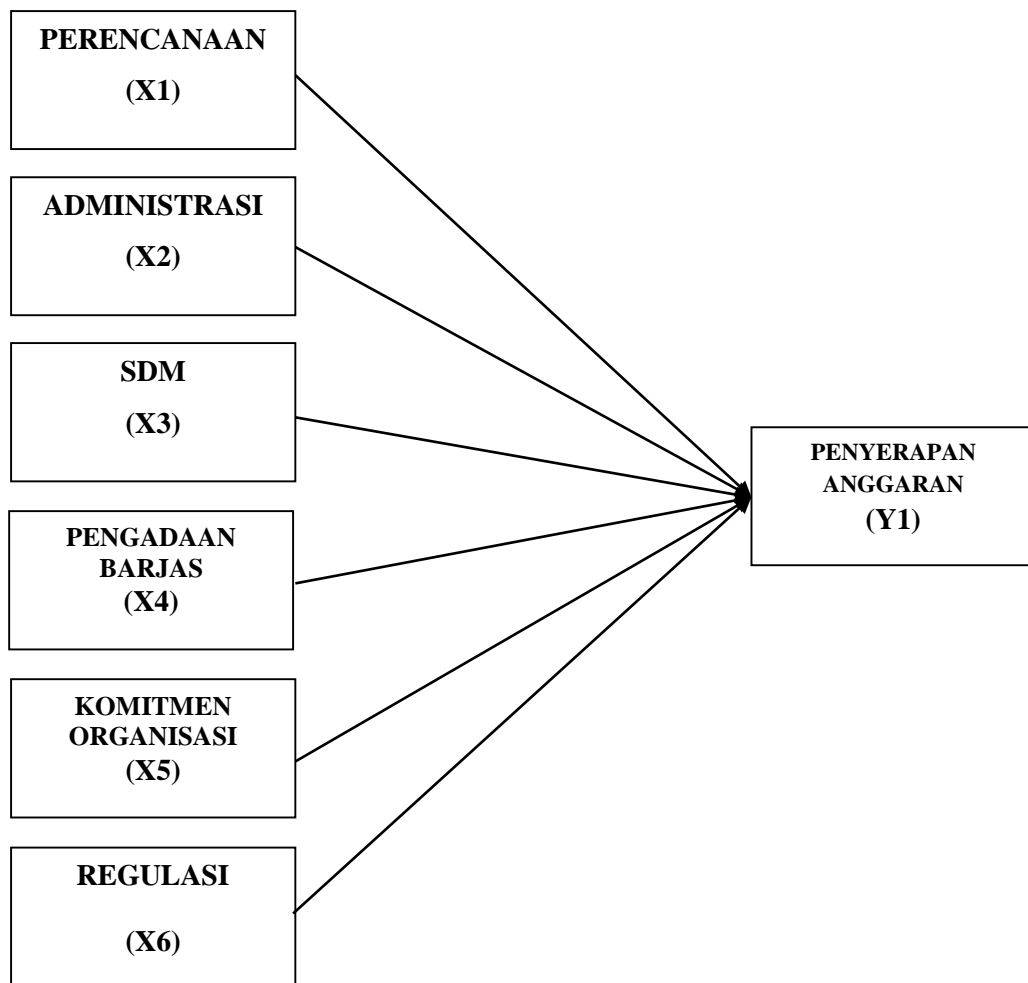
Penyerapan anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar umumnya masih rendah (LRA tahun 2011-2015). Penyebab dari rendahnya penyerapan anggaran ini adalah tidak efektifnya program-program yang telah direncanakan dengan realisasi kegiatan. Setiap akhir tahun instansi pemerintah berusaha merealisasikan program dan kegiatannya. Fenomena tersebut mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran dan tidak maksimalnya sasaran kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penilaian terhadap kinerja dan penyerapan anggaran instansi pemerintah (Wahyuni, *et.al* 2014).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa variabel terkait. Adanya fenomena yang terjadi terkait penyerapan anggaran menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti hubungan perencanaan anggaran, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka Gambar 3.1 kerangka pikir dan Gambar 3.2 kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Pikir





Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Penelitian ini menetapkan 6 (enam) hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui hubungan perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar.

3.2.1 Perencanaan terhadap penyerapan anggaran

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menjabarkan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan/sasaran. Penetapan sasaran program yang tepat melalui

perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan. Teori *public finance* menghantarkan bahwa institusi pemerintahan memerlukan perencanaan untuk mengalokasikan sumber anggaran dan mendistribusikan anggaran. Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun untuk kepentingan masyarakat, pada penyusunannya harus memperhitungkan rencana penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan (Putri, 2014). Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Setiap rencana kerja merupakan landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi pada perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, apabila dalam melaksanakan perencanaan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan maka kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan terjadi dan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

Kuswoyo (2012), meneliti mengenai faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri memberikan hasil bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab penumpukan anggaran belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar juga menghasilkan faktor perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja dan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto

(2012) tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Putri (2014) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan provinsi Bengkulu memberikan hasil bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian maka perencanaan memainkan peran penting terhadap penyerapan anggaran dan hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

3.2.2 Administrasi terhadap penyerapan anggaran

Administrasi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan (*goal*). Pernyataan tersebut sejalan dengan *goal setting theory* yang menjabarkan bahwa tujuan yang spesifik dapat mempermudah pencapaian tujuan. Sistem administrasi dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran merupakan bentuk pembagian kerja yang spesifik dengan tujuan yang rinci sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik oleh setiap individu-individu yang berperan didalamnya. Sehingga pada prakteknya sistem administrasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem administrasi juga dapat dikatakan sebagai sistem penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan. Karenanya keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan pada sejauh mana organisasi tersebut menata administrasi hingga sampai pada tahap pertanggung jawaban.

Menurut Putri (2014), berpendapat administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan yang disusun dalam sistem pemerintahan. Persiapan laporan keuangan dan pengeluaran senantiasa disertai dengan dokumen pendukung untuk mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012), tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian Fitriani *et.al* (2015) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kota Pekalongan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan Tatar (2010) tentang penyerapan anggaran di Estonia juga memberikan hasil bahwa faktor administrasi memengaruhi penyerapan dana struktural pada pemerintah daerah di Estonia terhadap dana Uni Eropa. Putri (2014), tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan provinsi Bengkulu memberikan hasil bahwa administrasi berkorelasi positif dan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dari beberapa bukti empiris diatas, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
H2: Administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

3.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penyerapan anggaran

Pada *goal setting theory* peran sumber daya manusia memegang peran penting terutama pada bagaimana menempatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Faktor kualitas sumber daya manusia dimasukkan ke dalam salah satu faktor yang menyebabkan minimnya serapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Bengkalis. Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Apabila orang yang ditempatkan tidak tepat pada jabatan-jabatan yang tersedia akan memberikan pengaruh yang negative terhadap perkembangan organisasi. Karenanya yang menjadi kunci keberhasilan pada pelaksanaan anggaran adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Makin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka makin tinggi capaian yang didapatkan pada pelaksanaan anggaran tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa sumber

daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan Fitriani *et. al* (2015), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa faktor administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Tatar (2010), tentang penyerapan anggaran di Estonia juga memberikan hasil bahwa faktor SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan Zaman dan Cristea (2011), tentang penyerapan anggaran di Romania yang memberikan hasil bahwa faktor SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Putri (2014), tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan provinsi Bengkulu memberikan hasil bahwa SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dari beberapa bukti empiris diatas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

3.2.4 Pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran

Peran institusi publik yang dipaparkan pada teori *public finance* menjelaskan bahwa hubungan dan fungsi institusi publik dan administrasi ialah berusaha memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui penyusunan dan alokasi anggaran. Salah satu upaya signifikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ialah melalui pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro (Fitriany dkk., 2015).

Penerapan ULP sebagai sistem yang beroperasi memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pada pengadaan barang dan jasa dituntut lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya agar meminimalisir serapan belanja daerah.

Hal ini tentunya membutuhkan lingkungan yang kondusif serta kualitas SDM yang ahli pada bidangnya masing-masing.

Penerapan ULP yang tidak diikuti dengan lingkungan yang kondusif ditambah dengan kurang berkualitasnya SDM didalam suatu lembaga, menjadikan ULP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya serapan belanja daerah. Selain itu, bahwa pelaksanaan ULP yang tanpa diiringi dengan kualitas sumber daya manusia ternyata juga berakibat pada lambatnya serapan anggaran belanja. Pada hal secara prinsip ULP justru dibentuk dalam rangka untuk melancarkan kinerja pemerintah dalam hal belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012), tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Albulescu dan Goyeau (2013), tentang penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa memberikan hasil bahwa persiapan proyek/pelelangan pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaman dan Cristea (2011) tentang penyerapan anggaran di Romania memberikan hasil bahwa proses pelelangan pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Putri (2014), tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa proses pelelangan pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan bukti empiris di atas maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

3.2.5 Komitmen Organisasi terhadap penyerapan anggaran

Teori penetapan tujuan (*goal setting*), merupakan penetapan sasaran (*goal*) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi, sehingga setiap pegawai akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sehingga akan meningkatkan ketepatan anggaran (Kusuma,2013). Komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dapat ditimbulkan dari partisipasi anggota dalam menentukan, merumuskan dan merencanakan program yang akan dijalankan yang akan memberikan hasil yang optimal pada outputnya. Sehingga komitmen organisasi dan capaian atas pelaksanaan anggaran merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Seperti yang dikemukakan oleh Locke (1968) bahwa komitmen terhadap tujuan merupakan derajat komitmen individu untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan aspek kunci dari teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*).

Faizzah dan Mildawati (2007) berpendapat komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi akan memicu tumbuhnya komitmen organisasional sehingga individu akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi (Latuheru, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen organisasi maka tujuan perusahaan lebih mudah tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridani (2014) tentang analisis penyerapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Bulungan menghasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya, penelitian Arif dan Halim (2013) mengemukakan bahwa salah satu penyebab

keterlambatan pengesahan APBD 2011 di kota Dumai adalah karena rendahnya komitmen organisasi baik pada kalangan eksekutif maupun legislative dalam menjalankan amanah dan tugas organisasi. Dari beberapa bukti empiris diatas, maka hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

3.2.6 Regulasi terhadap penyerapan anggaran

Teori institusional menjabarkan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh organisasi terutama organisasi sektor publik dipengaruhi oleh peran konsituten dan stakeholder (Alumbida, 2016). Pada prakteknya, teori institusional meninjau panduan berperilaku yang terdapat pada skema, aturan, norma, dan rutinitas (W. Richard Scott *dalam* Rotich, 2015). Keinginan berperilaku seseorang ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan oleh seperangkat norma tentang perilaku yang dimaksud. Perilaku individu-individu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sadar bahwa mereka senantiasa mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran inilah yang membentuk keyakinan dalam berperilaku sehingga menjauhkan individu dari melakukan kesalahan pada instansi dimana mereka melakukan tugas dan kewajibannya.

Menurut sejumlah praktisi dan hasil penelitian di sejumlah instansi pemerintah menunjukkan bahwa Perpres termasuk salah satu yang menyebabkan terjadinya keminiman dalam hal penyerapan belanja. Salah satu penyebab lambatnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya aturan-aturan yang berubah-ubah secara cepat dan sementara waktu yang tersedia dalam proses tersebut tidak terlalu banyak, sehingga membuat sebagian pelaksanaan anggaran agak sedikit mengalami kendala dalam pengimplementasiannya dari

suatu kegiatan. Sehingga aturan yang berubah-ubah dengan cepat dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2013) tentang Identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Riau menghasilkan bahwa regulasi merupakan faktor yang mendominasi penyebab minimnya penyerapan anggaran. Sedangkan Solikhin (2014) dalam penelitiannya tentang kecenderungan penumpukan belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran dan mengeksploitasi faktor-faktor penyebab pada satker di Wilayah KPPN Purwokerto, menghasilkan bahwa faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Arif (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan minimnya penyerapan anggaran kabupaten/kota di provinsi Riau, menghasilkan bahwa regulasi mempengaruhi minimnya penyerapan anggaran. Regulasi menjadi salah satu faktor yang ingin penulis uji disini dengan item pembentuk faktor diantaranya peraturan tentang pengelolaan keuangan dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa sering berubah-ubah. Dari beberapa bukti empiris diatas, maka hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) untuk memastikan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan *investigation type* yang bersifat kausalitas, yaitu dengan menunjukkan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi model penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu pegawai yang menduduki jabatan dibidang pengelolaan anggaran yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Bendahara Pengeluaran, Kasubag. Keuangan, Ka. Bagian Perencanaan, unit akuntansi/pelaporan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), panitia pengadaan barang dan Jasa, dan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan yang bekerja pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis di Makassar.

4.2 Situs dan Waktu Penelitian

a. Situs Penelitian

Situs penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar merupakan satuan kerja yang mengelola dana APBN.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Oktober hingga Desember 2017.

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unsur yang terdapat dalam obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan kopertis di Makassar periode 2011-2015. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan dibidang pengelolaan anggaran yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Bendahara Pengeluaran, Kasubag. Keuangan, Ka. Bagian Perencanaan, unit akuntansi/pelaporan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), panitia pengadaan barang dan Jasa, dan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.

Sampel diambil di 6 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis di Makassar diantaranya adalah Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar dan, Kopertis Wilayah IX. Alasan pemilihan responden ini adalah karena responden tersebut dianggap mampu menggambarkan penyerapan anggaran dari tiap satuan kerja secara keseluruhan, sehingga responden pada penelitian ini berjumlah 63 orang dari 7 (tujuh) instansi pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Kuesioner disebarkan dengan cara mendatangi langsung karena dapat memudahkan responden dan dapat memberikan penjelasan apabila ada item pertanyaan yang tidak dimengerti. Selain itu skenario ini mampu meminimalkan risiko tingkat tanggapan yang sangat rendah. Penulis berpendapat hal ini dapat lebih

menjamin kembalinya kuesioner daripada meminta responden untuk mengirim lewat pos. Untuk mendukung pengisian dan untuk memperoleh respon yang jujur maka identitas partisipan dijamin kerahasiaannya.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah :

- a. Jenis data sekunder, berasal dari seluruh PTN dan Kopertis di Makassar berupa data laporan realisasi anggaran, serta dokumen peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan anggaran pemerintah pusat serta laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.
- b. Dokumen laporan realisasi anggaran satuan kerja berasal dari Unit Sistem Akuntansi Instansi (SAI) PTN dan Kopertis di Makassar.
- c. Data primer, data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (data primer). Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka untuk mengetahui hasil penelitian dan informasi yang relevan serta regulasi yang berlaku terkait variabel yang diteliti (data sekunder).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner terdiri dari 4 bagian yaitu bagian pertama (huruf A), bagian kedua (huruf B) berisi pertanyaan tertutup dengan 30% pertanyaan berdasarkan persepsi responden. Pertanyaan tertutup berupa

daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarakan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dengan menggunakan skala *Likert*. Dalam menggunakan skala *Likert* dalam penelitian ini, jawaban terdiri dari 5 pilihan, yakni : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian nilai (Scoring) untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai 5, dan seterusnya menurun sampai pada jawaban sangat tidak setuju (STS) yang diberi nilai 1. Sementara itu pertanyaan terbuka, responden mengisi jawaban dalam kolom kosong apabila terdapat permasalahan yang tidak tercantum dalam pertanyaan tertutup.

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.6.1 Variabel Bebas (*Independen*)

.Variabel independen merupakan variabel penelitian yang memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur/dimanipulasi/dipilih oleh seorang peneliti untuk menetapkan/menentukan hubungan antara fenomena yang sedang diamati. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.1 Perencanaan Anggaran (X₁)

Perencanaan Anggaran merupakan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013:127). Menurut Mulyadi (1993) perencanaan anggaran adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan dan strategi hingga penyusunan anggaran.

Variabel perencanaan (X₁) diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dirujuk oleh Mulyadi, (1993). Indikator perencanaan dijabarkan dalam poin kuesioner

perencanaan yang terdiri dari penetapan visi dan misi, penetapan tujuan dan strategi, penyusunan program dan penyusunan anggaran. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.2 Administrasi (X₂)

Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lain termasuk administrasi pengadaan barang dan jasa serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan (Handyaningrat, 2008:2).

Variabel administrasi (X₂) diukur dengan menggunakan 4 indikator yang dijelaskan pada penelitian Priatno dan Khusaini, (2012). Indikator administrasi dijabarkan dalam poin kuesioner administrasi yang terdiri dari dokumen-dokumen, proses kegiatan, aksesibilitas informasi, dan sarana prasarana. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.3 Sumber Daya Manusia (X₃)

Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (Nawawi, 2001).

Variabel sumber daya manusia (X₃) diukur dengan menggunakan 4 indikator yang dijelaskan pada penelitian Ridani (2014) dan Juliani dan Sholihin (2016). Indikator sumber daya manusia dijabarkan dalam poin kuesioner sumber daya manusia yang terdiri

dari kompetensi SDM, kuantitas SDM, adanya penugasan rangkap dan sertifikasi dan pendidikan SDM yang memadai. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa (X4)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah, (Perpres No.70 tahun 2012). Disisi lain, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah semua fungsi yang berhubungan untuk memperoleh barang/jasa atau konstruksi/layanan yang prosesnya melalui deskripsi persyaratan, seleksi, pemberian kontrak dan hingga semua tahapan dalam administrasi kontrak. (Thai, 2001)

Variabel Pengadaan barang dan jasa (X₄) diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dirujuk dari penelitian Juliani dan Sholihin (2016). Indikator Pengadaan barang dan jasa dijabarkan dalam poin kuesioner Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari efisiensi dan efektivitas pengadaan, akuntabilitas pengadaan dan pemahaman peraturan pengadaan barang dan jasa. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.5 Komitmen Organisasi (X5)

Komitmen organisasi merupakan keterikatan secara afektif atau emosi terhadap organisasi oleh individu dengan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari organisasi, terlibat secara intensif pada kegiatan organisasi, dan merasa senang menjadi bagian dari organisasi (Mowday et.al, 1979).

Variabel Komitmen organisasi (X_5) diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dijelaskan pada penelitian Juliani dan Sholihin (2016). Indikator komitmen organisasi dijabarkan dalam poin kuesioner komitmen organisasi yang terdiri dari komitmen dan intervensi manajemen, budaya organisasi dan frekuensi rapat kerja koordinasi. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.1.6 Regulasi (X_6)

Ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah (Bastian, 2010:33).

Variabel regulasi (X_6) diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dijelaskan pada penelitian Bastian (2010). Indikator regulasi dijabarkan dalam poin kuesioner regulasi yang terdiri dari tumpang tindih regulasi, kurangnya sosialisasi regulasi dan ketidakadaan regulasi yang mengatur. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

4.6.2 Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran (Y_1) merupakan kemampuan suatu

Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada (Manasan dan Mercado, 2001).

Variabel penyerapan anggaran (Y_1) diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dijelaskan pada penelitian Manasan dan Mercado, (2001). Indikator penyerapan anggaran dijabarkan dalam poin kuesioner penyerapan anggaran yang terdiri dari kondisi proporsional penyerapan anggaran, penumpukan kegiatan, dan persentase serapan anggaran. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian dimulai dari pendapat sangat tidak setuju/STS (1), tidak setuju/TS (2), Netral/N (3), setuju/S (4), dan sangat setuju/SS (5).

Dalam penelitian ini, digunakan tujuh macam variabel penelitian dan operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Dependen			
Penyerapan Anggaran	Penyerapan anggaran merupakan kemampuan suatu Kementerian/Lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada (Manasan dan Mercado, 2001)	1) Proporsional penyerapan anggaran 2) Penumpukan kegiatan 3) Persentase serapan anggaran	Ordinal
Independen			
Perencanaan Anggaran	Perencanaan anggaran adalah proses yang dimulai dari penetapan filosofi dan misi hingga penyusunan anggaran. (Mulyadi, 1993).	1) Penetapan tujuan dan strategi 2) Penyusunan program 3) Penyusunan Anggaran	Ordinal
Administrasi	Merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lain termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa (Handyaningrat, 1988:2)	1) Pengarsipan 2) Sarana administrasi 3) Aksesibilitas	Ordinal

Sumber Daya Manusia (SDM)	Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, (Nawawi, 2001)	1) Kompetensi SDM 2) Kuantitas SDM 3) Penugasan rangkap 4) Sertifikasi dan Pendidikan	Ordinal
Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah semua fungsi yang berhubungan untuk memperoleh barang/jasa atau konstruksi/layanan yang prosesnya melalui deskripsi persyaratan, seleksi, pemberian kontrak dan hingga semua tahapan dalam administrasi kontrak. (Thai, 2001)	1) Efisiensi dan efektivitas 2) Akuntabilitas 3) Kesesuaian peraturan	Ordinal
Komitmen Organisasi	Suatu kelekatan organisasi sebagai suatu kelekatan efeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi (Mowday et.al, 1979).	1) <i>Affective commitment</i> 2) <i>Continuance commitment</i> 3) <i>Normative commitment</i>	Ordinal
Regulasi	Ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah (Bastian, 2010:33)	1) Tumpang tindih regulasi 2) Sosialisasi regulasi 3) SOP	Ordinal

4.7 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yakni dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009). Pertanyaan dalam kuesioner ini diambil dari beberapa penelitian sebelumnya. Kuesioner perencanaan diambil dari Mulyadi (1993). Kuesioner administrasi diambil dari penelitian Priatno dan Khusaini (2012). Kuesioner Sumber daya manusia diambil dari penelitian Ridani (2014) dan Juliani dan Sholihin (2016). Kuesioner pengadaan barang dan jasa diambil dari penelitian Juliani dan Sholihin (2016). Kuesioner komitmen organisasi diambil dari penelitian Juliani dan Sholihin (2016).

(2016). Kuesioner regulasi diambil dari penelitian Bastian (2010). Kuesioner penyerapan anggaran diambil dari penelitian Manasan dan Mercado (2001).

Untuk mengukur pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert yaitu skala yang di desain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik (Sugiyono, 2009).

4.8 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16.0. Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

4.8.1 Uji Kualitas Data

4.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi pearson yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada 0,05 atau 0,01 maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2007).

4.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2007). Instrumen

dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan bantuan program SPSS 23.0 Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria lebih dari 0,6 adalah reliabel.

4.8.2 Uji Asumsi Klasik

4.8.2.1 Uji Normalitas

Ghozali (2007) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan secara deskriptif dengan meninjau grafik sebaran data residual pada *normal probability plot*. Kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila sebaran data berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal maka data dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

4.8.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value (Ghozali, 2007). Batas dari tolerance value adalah $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 .

4.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2007), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya). Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas* bukan *Heteroskedastisitas*. Selanjutnya, untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%.

4.8.3 Uji Hipotesis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran (X1), administrasi (X2), kompetensi SDM (X3), proses pelelangan pengadaan barang dan jasa (X4), komitmen organisasi (X5), regulasi (X6) terhadap penyerapan anggaran (Y). Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dalam hal ini adalah :

b_0 = Konstanta

X_1 = Perencanaan anggaran

X_2 = Administrasi

X_3 = SDM

X_4 = Pengadaan barang dan jasa

X_5 = Komitmen organisasi

X_6 = Regulasi

Y = Penyerapan anggaran

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$ = Koefisien regresi untuk $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$

e = *error term*

4.8.3.1 Uji koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R²)

Nilai Adjusted R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (Adjusted $R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila Adjusted $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila Adjusted $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

4.8.3.2 Uji statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL

5.1 Gambaran Umum

Penelitian ini melibatkan enam variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen tersebut terdiri atas perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi sedangkan variabel dependen yaitu penyerapan anggaran. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner.

Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu pegawai yang menjabat di bidang pengelolaan anggaran yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, Unit akuntansi/pelaporan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), panitia pengadaan barang dan jasa, dan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan. Distribusi kuesioner dapat diperhatikan lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Distribusi kuesioner

Instansi	Diberikan	Dikembalikan	Persentase
Politeknik Negeri Ujung Pandang	10	10	100%
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	10	10	100%
Universitas Hasanuddin	10	10	100%
Universitas Islam Negeri Alauddin	10	10	100%
Politeknik Ilmu Pelayaran	10	10	100%
Politeknik Pariwisata	10	10	100%
Kopertis	10	10	100%
Jumlah	70	70	100%

Sumber : Data primer, 2017

Pendistribusian kuesioner pada responden dilakukan secara optimal melalui komunikasi tatap muka maupun memanfaatkan surat elektronik. Peneliti secara rutin mengontrol pendistribusian dan pengembalian kuesioner sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) mencapai 100%. Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan pengisian, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Evaluasi kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner didistribusikan	70
Kuesioner dikembalikan	70
Kuesioner tidak lengkap	0
Kuesioner yang dapat digunakan	70
<i>Useable response rate</i>	100%

Sumber : Data primer, 2017

Kedekatan peneliti dengan responden dapat memengaruhi keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Pekerjaan peneliti yang bergelut pada bidang pengadaan barang dan jasa pada salah satu institusi penyelenggara pendidikan membantu peneliti untuk menjelaskan secara detail terkait rencana penelitian dan tujuan kuesioner sehingga responden memahami dengan baik isi kuesioner dan mengisinya dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut tercermin dari hasil evaluasi kuesioner yang menunjukkan *useable response rate* mencapai 100%.

Responden pada penelitian terdiri atas berbagai latar belakang yang dapat memengaruhi persepsi responden terhadap suatu objek atau permasalahan. Karakteristik responden yang terlibat pada penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Karakteristik responden

Karakteristik	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	54	77,14%
	Perempuan	16	22,86%
Jabatan	KPA	0	0%
	PPK	3	4,29%
	PP SPM	3	4,29%
	Bendahara	5	7,14%
	Kasubag Keuangan	4	5,71%
	Bag. Perencanaan	8	11,43%
	Unit akuntansi/pelaporan	14	20,00%
	Unit layanan pengadaan	15	21,43%
	Panitia pengadaan	10	14,29%
	Panitia pemeriksa dan penerima	8	11,43%
Lama bekerja	≤ 5 tahun	6	8,57%
	6 – 10 tahun	24	34,29%
	11 – 15 tahun	9	12,86%
	16 – 20 tahun	15	21,43%
	20 – 25 tahun	5	7,14%
	> 25 tahun	11	15,71%
Pendidikan	SMA	15	21,43%
	D III/S1	40	57,14%
	S2	11	15,71%
	S3	4	5,71%

Sumber : Data primer, 2017

Data yang telah dihimpun menunjukkan bahwa berdasarkan gender maka mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54 orang (77,14%) sedangkan perempuan 16 orang (22,86%). Responden pada penelitian merupakan individu yang mengisi berbagai posisi terkait pengadaan barang dan jasa. Data yang dikumpulkan menunjukkan responden yang mendominasi pada penelitian yaitu responden yang berposisi pada Unit Layanan Pengadaan (21,43%) serta Unit akuntansi/pelaporan (20%) sedangkan yang paling sedikit yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan PP SPM masing-masing 4,29%.

Responden pada penelitian ini menunjukkan beberapa variasi lama bekerja yang dapat menunjukkan tingkat pengalaman bekerja responden. Responden didominasi oleh individu yang telah memiliki masa kerja pada rentang waktu 6 – 10 tahun sebanyak 24 orang (34,29%). Berdasarkan data yang telah dihimpun dengan mengambil nilai tengah dapat dinyatakan bahwa responden yang telah bekerja di atas 15 tahun sebanyak 31 orang (44,28%) dan di bawah 15 tahun sebanyak 39 orang (45,72%). Untuk latar belakang pendidikan responden didominasi oleh responden berpendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) yaitu sebanyak 40 orang (57,14%), sedangkan sisanya yaitu 15 orang berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) dan 15 orang yang berpendidikan SMA sederajat.

5.2 Statistik Deskriptif

Analisis secara deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum data yang telah dikumpulkan pada setiap variabel penelitian. Teknik analisis deskriptif diaplikasikan dengan meninjau distribusi jawaban responden pada setiap pertanyaan yang diajukan. Penentuan interval nilai menggunakan skala likert yang diterapkan pada kuesioner yaitu nilai terendah 1 dan tertinggi 5 dengan jumlah sampel responden

sebanyak 70 responden maka rumus yang digunakan untuk menentukan interval menurut Sudjana (2008:79) adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor tertinggi} : 70 \times 5 = 350$$

$$\text{Skor terendah} : 70 \times 1 = 70$$

$$\text{Interval} : (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) / \text{jumlah kelas}$$

$$: (350 - 70) / 5 = 56$$

Berdasarkan nilai interval yang diperoleh maka kategorisasi jawaban responden dapat ditunjukkan sebagai berikut :

70 – 126 : Sangat rendah

127 – 182 : Rendah

183 – 238 : Cukup

239 – 294 : Tinggi

295 – 350 : Sangat tinggi

Pembahasan secara deskriptif pada tiap variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Variabel perencanaan disimbolkan X1 meliputi dua indikator dan lima pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan gambaran umum variabel perencanaan (X1).

Tabel 5.4 Deskriptif variabel X1

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Visi Misi	1	0	0	0	0	0	0	20	80	50	250	330

Tujuan dan strategi	2	0	0	0	0	0	0	22	88	48	240	328
Penyusunan program dan anggaran	3	0	0	0	0	0	0	31	124	39	195	319
	4	0	0	0	0	1	3	34	136	35	175	314
	5	0	0	0	0	10	30	46	184	14	70	284
Rata-rata											305,67	
Rata-rata total											315	

Sumber : Data primer, 2017

Pada tabel di atas nilai rata-rata total yang diperoleh sebesar 315 yang menunjukkan bahwa responden memberi tanggapan sangat positif terhadap variabel perencanaan. Tanggapan responden pada indikator tujuan dan strategi (329) lebih tinggi dibandingkan indikator penyusunan program dan anggaran (305,67).

Untuk mengetahui indikator yang dominan pada variabel perencanaan maka dapat diperhatikan pada tabel hasil uji korelasi berikut.

Tabel 5.5 Uji korelasi indikator variabel X1

Indikator	Korelasi	Signifikan
Visi dan Misi	0,886	0,000
Tujuan dan Strategi	0,895	0,000
Penyusunan program dan anggaran	0,846	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketiga indikator yang digunakan berkorelasi atau berhubungan signifikan terhadap nilai variabel perencanaan. Indikator yang dominan ditunjukkan oleh nilai korelasi yang paling besar yaitu pada indikator tujuan dan strategi (0,846). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada

kegiatan perencanaan, hal utama yang perlu diperhatikan yaitu penetapan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Administrasi

Variabel independen kedua pada penelitian ini yaitu administrasi (X2). Tabel berikut menunjukkan gambaran umum distribusi data variabel administrasi.

Tabel 5.6 Deskriptif variabel X2

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Proses Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	42	168	28	140	308
Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	27	108	43	215	323
Sarana	3	0	0	0	0	0	0	53	212	17	85	297
Aksesibilitas	4	0	0	0	0	5	15	33	132	32	160	307
Rata-rata total											308,75	

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan nilai rata-rata total yang diperoleh (308,75) menunjukkan bahwa responden memberi tanggapan sangat tinggi terhadap variabel administrasi. Dari tiga indikator yang digunakan diketahui bahwa indikator pengarsipan memperoleh tanggapan tertinggi (315,5) kemudian aksesibilitas (307) dan sarana (297).

Tingkat korelasi indikator yang digunakan untuk memprediksi variabel administrasi dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Uji korelasi indikator variabel X2

Indikator	Korelasi	Signifikan
Proses kegiatan	0,555	0,000
Dokumen	0,713	0,000
Sarana	0,587	0,000
Aksesibilitas	0,664	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Keempat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel administrasi menunjukkan korelasi yang signifikan. Adapun indikator yang menunjukkan korelasi tertinggi yaitu pada indikator dokumen (0,713). Proses administrasi dipersepsikan oleh responden sebagai kegiatan yang identik dengan dokumen sehingga perhatian yang detail kepada dokumen sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan pada proses administrasi (maladministrasi).

3. Sumber daya manusia

Variabel sumber daya manusia disimbolkan X3 terdiri atas empat indikator dan empat item pertanyaan. Berikut gambaran umum variabel X3.

Tabel 5.8 Deskriptif variabel X3

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Kompetensi	1	0	0	0	0	2	6	34	136	34	170	312
Kuantitas	2	0	0	0	0	9	27	46	184	15	75	286
Penugasan	3	0	0	0	0	3	9	35	140	32	160	309

rangkap												
Sertifikasi/ pendidikan	4	0	0	0	0	1	3	51	204	18	90	297
Rata-rata total												301

Sumber : Data primer, 2017

Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata total mencapai 301 dan termasuk kategori sangat tinggi (positif). Tiga indikator termasuk kategori sangat positif yaitu kompetensi memperoleh tanggapan tertinggi (312) kemudian penugasan rangkap (309) dan sertifikasi dan pendidikan (297) sedangkan indikator kuantitas memperoleh tanggapan termasuk kategori tinggi (286).

Untuk mengetahui indikator yang dominan berkorelasi terhadap variabel sumber daya manusia maka dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Uji korelasi indikator variabel X3

Indikator	Korelasi	Signifikan
Kompetensi	0,692	0,000
Kuantitas	0,571	0,000
Penugasan rangkap	0,654	0,000
Sertifikasi/Pelatihan	0,554	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa keempat indikator yang digunakan berkorelasi signifikan terhadap

variabel sumber daya manusia. Indikator dengan nilai korelasi tertinggi yang menunjukkan dominasi yaitu pada indikator kompetensi (0,692). Hasil tersebut, secara deskriptif, menunjukkan bahwa indikator utama untuk menilai sumber daya manusia yaitu pada kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan.

4. Pengadaan barang dan jasa

Pada penelitian ini variabel independen keempat yaitu pengadaan barang dan jasa yang disimbolkan X4. Variabel X4 terdiri atas tiga pertanyaan dan empat item pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan gambaran umum data variabel X4.

Tabel 5.10 Deskriptif variabel X4

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Efisiensi dan efektivitas	1	0	0	0	0	0	0	20	80	50	250	330
	2	0	0	0	0	0	0	34	136	36	180	316
Rata-rata											323	
Akuntabilitas	3	0	0	0	0	0	0	29	116	41	205	321
Kesesuaian peraturan	4	0	0	0	0	0	0	18	72	52	260	332
Rata-rata total											324,75	

Sumber : Data primer, 2017

Variabel pengadaan barang dan jasa memperoleh tanggapan yang sangat tinggi (positif) dengan nilai rata-rata total mencapai 324,75. Indikator yang memperoleh tanggapan tertinggi yaitu kesesuaian peraturan (332) kemudian efisiensi dan efektivitas (323) serta akuntabilitas (321).

Tabel berikut ini menunjukkan tingkat hubungan setiap indikator terhadap variabel pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5.11 Uji korelasi indikator variabel X4

Indikator	Korelasi	Signifikan
Efisiensi dan efektivitas	0,588	0,000
Akuntabilitas	0,697	0,000
Kesesuaian peraturan	0,711	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Indikator dengan nilai tertinggi dan menunjukkan dominasi yaitu pada indikator kesesuaian peraturan (0,711). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan barang jasa maka responden mengutamakan kesesuaian proses pengadaan dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari potensi pelanggaran yang dapat menjadi temuan auditor pada saat pemeriksaan.

5. Komitmen organisasi

Variabel independen kelima yaitu komitmen organisasi (X5) yang terdiri atas tiga indikator dan enam pertanyaan. Gambaran umum variabel X5 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Deskriptif variabel X5

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
<i>Affective commitment</i>	1	0	0	0	0	2	6	46	184	22	110	300
	2	0	0	0	0	5	15	64	256	1	5	276
Rata-rata											288	
<i>Continuance</i>	3	0	0	8	16	41	123	20	80	1	5	224

<i>commitment</i>	4	0	0	0	0	8	24	50	200	12	60	284
Rata-rata												254
<i>Normative</i>	5	0	0	0	0	2	6	67	268	1	5	279
<i>commitment</i>	6	0	0	1	2	5	15	63	252	1	5	274
Rata-rata												276,5
Rata-rata total												272,83

Sumber : Data primer, 2017

Variabel komitmen organisasi memperoleh tanggapan tinggi (272,83) dari responden. Komitmen afektif memperoleh tanggapan tertinggi (288) kemudian komitmen normatif (276,5) dan komitmen kontinu (254).

Untuk mengetahui indikator dominan pada variabel komitmen organisasi maka dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Uji korelasi indikator variabel X5

Indikator	Korelasi	Signifikan
<i>Affective commitment</i>	0,609	0,000
<i>Continous commitment</i>	0,658	0,000
<i>Normative commitment</i>	0,671	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ketiga indikator menunjukkan hubungan atau korelasi yang signifikan terhadap variabel komitmen organisasi. Indikator yang mendominasi variabel komitmen organisasi terdapat pada indikator *normative commitment* (0,671). *Normative commitment* atau komitmen normatif merupakan komitmen individu terhadap norma-norma yang berlaku di organisasi sehingga individu tersebut merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi. Persepsi responden

menunjukkan bahwa komitmen normatif sebagai indikator dominan merupakan indikator komitmen yang dapat merepresentasikan komitmen organisasi secara menyeluruh.

6. Regulasi

Variabel keenam yaitu variabel independen dari regulasi disimbolkan X6. Variabel X6 terdiri atas tiga indikator. Tabel berikut menunjukkan gambaran umum data variabel X6.

Tabel 5.14 Deskriptif variabel X6

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Tumpang tindih	1	0	0	0	0	0	0	47	188	23	115	303
Sosialisasi	2	0	0	0	0	1	3	42	168	27	135	306
SOP	3	0	0	1	2	1	3	37	148	31	155	308
Rata-rata											305,67	

Sumber : Data primer, 2017

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa variabel regulasi memperoleh tanggapan sangat tinggi (305,67). Nilai antara ketiga indikator tidak berbeda jauh yaitu indikator SOP menunjukkan nilai tertinggi (308) kemudian sosialisasi (306) dan tumpang tindih peraturan (303).

Variabel regulasi pada penelitian ini diindikasikan melalui tiga indikator. Untuk mengetahui indikator yang dominan dapat diperhatikan pada tabel hasil uji korelasi berikut ini.

Tabel 5.15 Uji korelasi indikator variabel X6

Indikator	Korelasi	Signifikan
-----------	----------	------------

Tumpang tindih	0,683	0,000
Sosialisasi	0,799	0,000
SOP	0,720	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel regulasi menunjukkan hubungan yang signifikan. Namun, indikator yang dominan ditunjukkan pada indikator sosialisasi (0,799). Sosialisasi terhadap setiap regulasi baru dipandang sebagai suatu hal yang *urgent* pada aspek regulasi sehingga setiap individu yang akan terlibat dalam kegiatan penganggaran memahami dan dapat menerapkan regulasi tersebut.

7. Penyerapan anggaran

Variabel penyerapan anggaran merupakan variabel dependen pada penelitian ini atau disimbolkan Y. Variabel tersebut terdiri atas tiga indikator dan 11 item pertanyaan. Tabel berikut menyajikan gambaran umum data terkait variabel Y.

Tabel 5.16 Deskriptif variabel Y

Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		Total
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Penyerapan anggaran	1	6	6	24	48	36	108	4	16	0	0	178
	2	0	0	0	0	10	30	27	108	33	165	303
	3	0	0	2	4	15	45	27	108	26	130	287
	4	0	0	14	28	47	141	9	36	0	0	205
	5	0	0	0	0	1	3	42	168	27	135	306
Rata-rata											255,8	

Sumber : Data primer, 2017

Nilai rata-rata total pada variabel penyerapan anggaran sebesar 255,8 termasuk kategori tinggi. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan terkait kondisi penyerapan anggaran di akhir tahun yaitu

pernyataan ke-2 (303) dan ke-5 (306). Skor terendah diberikan responden pada pernyataan ke-1 (178) terkait proporsionalitas penarikan anggaran setiap periode (triwulan).

Untuk mengetahui indikator yang dominan pada variabel dependen penyerapan anggaran maka dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Uji korelasi indikator variabel Y

Indikator	Korelasi	Signifikan
Proporsional	0,886	0,000
Penumpukan	0,895	0,000
Persentase serapan anggaran	0,846	0,000

Sumber : Data primer, 2017

Hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa ketiga indikator variabel penyerapan anggaran berkorelasi signifikan. Adapun indikator dengan nilai korelasi tertinggi dan dominan yaitu pada indikator penumpukan anggaran (0,895). Lambat nya proses persetujuan dan pencairan anggaran menyebabkan terjadinya penumpukan anggaran di akhir periode anggaran. Hal tersebut dipersepsikan oleh responden sebagai indikasi utama yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran.

5.3 Kualitas Data

Instrumen kuesioner dalam penelitian perlu dianalisis terlebih dahulu kualitasnya sebelum digunakan untuk membangun suatu model regresi. Pengujian kualitas data dilakukan dengan meninjau validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

5.3.1 Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan korelasi pearson berdasarkan korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total. Kriteria item pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki nilai korelasi $>0,3$ dan signifikan $<0,05$.

1. Perencanaan – X1

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dengan korelasi spearman pada lima pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan (X1).

Tabel 5.18 Validitas variabel X1

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,729	0,000	Valid
2	0,761	0,000	Valid
3	0,752	0,000	Valid
4	0,715	0,000	Valid
5	0,593	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Korelasi antar setiap item pertanyaan terhadap nilai total menunjukkan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,30 dan signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga kelima pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Oleh karena itu maka variabel X1 dapat digunakan untuk membangun model regresi dengan lima item pertanyaan.

2. Administrasi – X2

Variabel administrasi disimbolkan X2 terdiri atas empat item pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas pada variabel administrasi X2.

Tabel 5.19 Validitas variabel X2

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,701	0,000	Valid
2	0,713	0,000	Valid
3	0,661	0,000	Valid
4	0,715	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa korelasi antara setiap item pertanyaan dengan nilai total variabel X2 memenuhi kriteria validitas (korelasi $>0,30$ dan signifikan $<0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dapat digunakan untuk mengonstruksu suatu model regresi dengan empat item pertanyaan.

3. Sumber daya manusia – X3

Variabel sumber daya manusia diukur menggunakan empat item pertanyaan. Berikut hasil uji validitas variabel X3.

Tabel 5.20 Validitas variabel X3

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,763	0,000	Valid
2	0,683	0,000	Valid
3	0,745	0,000	Valid
4	0,654	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Hasil uji validitas pada variabel X3 menunjukkan setiap item pertanyaan memiliki korelasi yang sesuai kriteria validitas (lebih besar dari 0,30) terhadap

skor total. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa variabel X3 dapat digunakan untuk pemodelan regresi dengan empat item pertanyaan.

4. Pengadaan barang dan jasa – X4

Pada penelitian ini variabel pengadaan barang dan jasa disimbolkan X4 dan terdiri atas empat item pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas pada variabel X4.

Tabel 5.21 Validitas variabel X4

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,570	0,000	Valid
2	0,756	0,000	Valid
3	0,727	0,000	Valid
4	0,663	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi item terhadap skor total lebih dari 0,30 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa variabel X4 memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan untuk membangun model regresi dengan empat item pertanyaan.

5. Komitmen organisasi – X5

Variabel komitmen organisasi (X5) diinterpretasikan berdasarkan enam item pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian validitas pada variabel X5.

Tabel 5.22 Validitas variabel X5

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
----------------	----------	------------	------------

1	0,753	0,000	Valid
2	0,506	0,000	Valid
3	0,642	0,000	Valid
4	0,747	0,000	Valid
5	0,313	0,008	Valid
6	0,532	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Keenam item pertanyaan pada variabel X5 memiliki korelasi lebih dari 0,30 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka keenam item pertanyaan tersebut memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk pemodelan regresi.

6. Regulasi – X6

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas pada variabel regulasi (X6).

Tabel 5.23 Validitas variabel X6

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,808	0,005	Valid
2	0,881	0,000	Valid
3	0,861	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Ketiga item pertanyaan yang digunakan mengukur variabel X6 berkorelasi lebih besar dari 0,30 terhadap skor total dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu maka variabel X6 dapat digunakan untuk membangun model regresi dengan tiga item pertanyaan.

7. Penyerapan anggaran – Y

Penyerapan anggaran merupakan variabel terikat pada penelitian ini disimbolkan Y. Variabel Y diukur menggunakan 5 (lima) item

pertanyaan. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas pada item pertanyaan variabel Y.

Tabel 5.24 Validitas variabel Y

Pertanyaan ke-	Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	0,875	0,000	Valid
2	0,830	0,000	Valid
3	0,802	0,001	Valid
4	0,176	0,146	Tidak valid
5	0,517	0,000	Valid

Sumber : Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 5.23 dapat diketahui bahwa korelasi item terhadap skor total pada item pertanyaan 1,2,3, dan 5 lebih besar dari 0,30 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Pertanyaan ke-4 menunjukkan nilai korelasi 0,176 dengan nilai signifikan 0,146 sehingga pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Y dapat digunakan sebagai variabel terikat pada pemodelan regresi dengan menggunakan 4 (empat) item dari 5 (item) pertanyaan yang telah diajukan.

5.3.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas atau kehandalan instrumen dilakukan dengan meninjau nilai *cronbach alpha*. Kriteria instrumen dinyatakan handal jika menunjukkan nilai *cronbach alpha* >0,6 (batas moderat). Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada ketujuh variabel penelitian.

Tabel 5.25 Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	N	Keterangan
X1	0,743	5	Reliabel
X2	0,640	4	Reliabel
X3	0,674	4	Reliabel

X4	0,615	4	Reliabel
X5	0,632	6	Reliabel
X6	0,804	3	Reliabel
Y	0,799	4	Reliabel

Sumber : Data primer, 2017

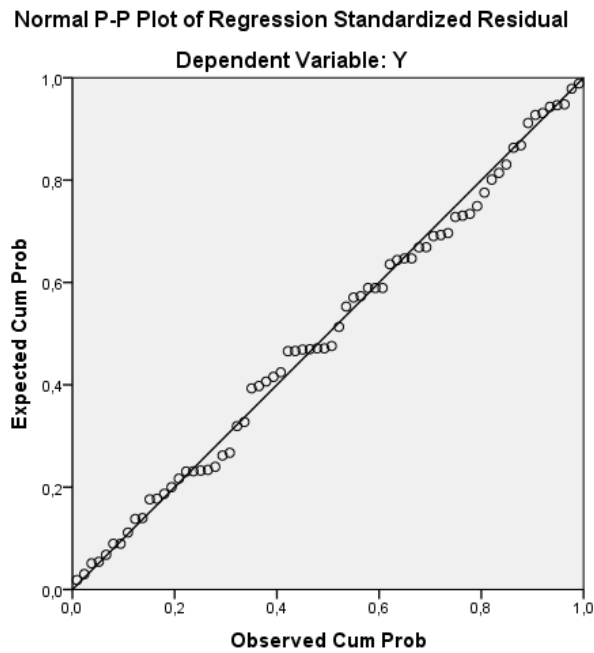
Nilai *cronbach alpha* yang ditunjukkan oleh setiap variabel memenuhi kriteria pengujian reliabilitas (0,60) sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur ketujuh variabel penelitian dengan 30 item pertanyaan dapat dinyatakan handal. Variabel dengan tingkat reliabilitas tertinggi yaitu variabel regulasi (X6;0,840) sedangkan terendah yaitu variabel pengadaan barang dan jasa (X4;0,615).

5.4 Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi berganda perlu memenuhi beberapa asumsi untuk terhindar dari penarikan kesimpulan yang keliru/bias. Asumsi yang perlu dipenuhi agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased estimator) yaitu asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

5.4.1 Normalitas

Pada penelitian ini data yang diperoleh di analisis normalitas secara deskriptif menggunakan grafik *normal probability plot* (normal p-p). Gambar berikut menunjukkan grafik normal p-p.



Gambar 5.1 Grafik sebaran data residual

Gambar di atas menunjukkan sebaran data residual mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang telah dikumpulkan memenuhi asumsi normalitas.

5.4.2 Multikolinearitas

Asumsi multkolinearitas bertujuan untuk menguji variabel independen yang digunakan tidak berkorelasi dengan variabel independen lainnya sehingga yang diharapkan ialah tidak terjadinya multikolinearitas. Hal tersebut penting dilakukan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bias pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai VIF (variance inflating factor) dengan kriteria jika nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Tabel berikut menunjukkan hasil uji asumsi multikolinearitas.

Tabel 5.26 Hasil uji asumsi multikolinearitas

Variabel	VIF	Kriteria	Keterangan
----------	-----	----------	------------

X1	1,523	VIF<10	Bebas multikolinearitas
X2	1,721		Bebas multikolinearitas
X3	2,215		Bebas multikolinearitas
X4	3,732		Bebas multikolinearitas
X5	2,479		Bebas multikolinearitas
X6	4,017		Bebas multikolinearitas

Sumber : Data primer, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa keenam variabel independen bebas dari multikolinearitas. Oleh karena itu maka keenam variabel tersebut telah tepat digunakan sebagai variabel independen (bebas) dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

5.4.3 Heterokedastisitas

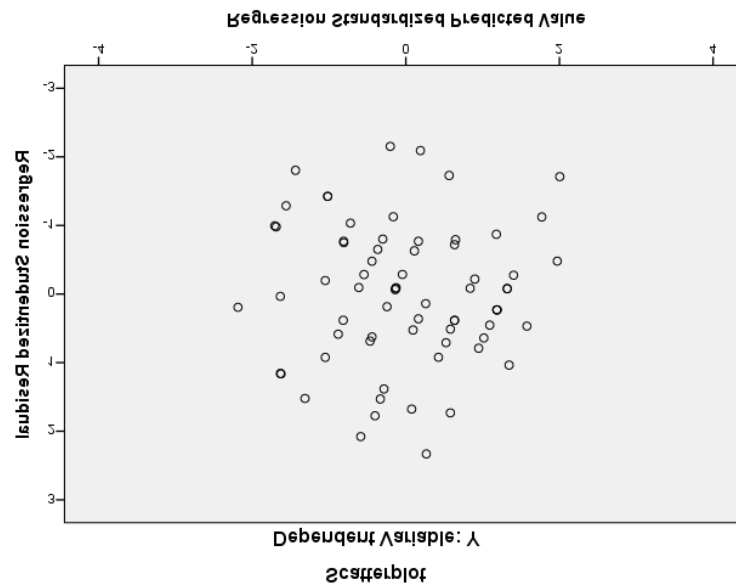
Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan secara inferensial dengan uji glejser dan deskriptif dengan memperhatikan pola sebaran data residual pada *scatter plot*. Hasil uji glejser dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Hasil uji glejser

Variabel	Signifikan	Kriteria	Keterangan
X1	0,864	>0,05	Bebas heterokedastisitas
X2	0,303		Bebas heterokedastisitas
X3	0,088		Bebas heterokedastisitas
X4	0,817		Bebas heterokedastisitas
X5	0,384		Bebas heterokedastisitas
X6	0,608		Bebas heterokedastisitas

Sumber : Data primer, 2017

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada setiap variabel independen tidak memiliki hubungan signifikan terhadap data residual sehingga dapat dinyatakan bebas dari heterokedastisitas. Untuk pengujian heterokedastisitas secara deksriptif dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 5.2 Grafik *scatter plot*

Pada gambar di atas dapat diperhatikan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak membentuk suatu pola tertentu dan tersebar pada bagian atas dan bawah angka 0. Berdasarkan hasil analisis secara inferensial dan deskriptik maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk membangun model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau tidak ada korelasi antara besarnya data dengan data residu sehingga bila data diperbanyak tidak akan meningkatkan tingkat kesalahan.

5.5 Pengujian Hipotesis dan Ketepatan Model

Hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini bersifat parsial sehingga pengujian hipotesis yang dilakukan ialah menggunakan uji-T untuk mengetahui

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ketepatan model diukur berdasarkan koefisien determinasi (R^2).

Tabel 5.28 Hasil regresi linear berganda

Variabel	Koefisien	T	Signifikan
Konstan	-16,156	-7,090	0,000
Perencanaan - X1	0,209	3,057	0,003
Administrasi- X2	0,097	0,898	0,373
SDM - X3	0,054	0,455	0,651
Pengadaan barang/jasa - X4	0,608	3,273	0,002
Komitmen organisasi- X5	0,290	2,353	0,022
Regulasi - X6	0,544	3,179	0,002
$t_{tabel} = 1,998$ (nilai yang t_{hitung} ditolak antara -1,998 dan +1,998) <i>Adjusted R² = 0,831</i>			

Sumber : Data primer, 2017

Hasil perhitungan model regresi linear berganda yang terdapat pada Tabel 5.27 dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda yang telah disusun sebagai berikut :

$$Y = -16,156 + 0,209X1 + 0,097X2 + 0,054X3 + 0,608X4 + 0,290X5 + 0,544X6$$

Keterangan :

Y : Penyerapan anggaran

$X1$: Perencanaan

$X2$: Administrasi

$X3$: Sumber Daya Manusia

$X4$: Pengadaan Barang dan Jasa

$X5$: Komitmen Organisasi

$X6$: Regulasi

Koefisien -16,156 menunjukkan bahwa pada saat variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 bernilai 0 (nol) maka variabel penyerapan anggaran bernilai -16,156. Berdasarkan persamaan regresi yang telah disusun dapat diketahui bahwa enam variabel independen dinyatakan berhubungan positif terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran) yaitu perencanaan (X1), administrasi (X2), sumber daya manusia (X3), pengadaan barang dan jasa (X4), komitmen organisasi (X5) dan regulasi (X6). Nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) menunjukkan nilai 0,831 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen dengan akurasi 83,1% sedangkan 26,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Akurasi tersebut menunjukkan nilai akurasi yang sangat tinggi (0,8 – 1,00) sehingga pemilihan variabel independen untuk membangun model regresi dan menguji hipotesis terhadap penyerapan anggaran dapat dinyatakan sebagai faktor dominan yang memengaruhi penyerapan anggaran.

Hasil perhitungan menunjukkan tidak semua variabel independen dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan kriteria signifikansi (nilai sig.<0,05) maka variabel yang dinyatakan berpengaruh signifikan dan mendukung hipotesis yaitu variabel perencanaan (X1), pengadaan barang dan jasa (X4), komitmen organisasi (X5), dan regulasi (X6). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Koefisien	Signifikan	Keterangan
H1 : X1 ---> Y (+)	0,209	0,003	Diterima
H2 : X2 ---> Y (+)	0,097	0,373	Ditolak
H3 : X3 ---> Y (+)	0,054	0,651	Ditolak
H4 : X4 ---> Y (+)	0,608	0,002	Diterima

H5 : X5 ---> Y (+)	0,290	0,022	Diterima
H6 : X6 ---> Y (+)	0,544	0,002	Diterima

Sumber : Data primer, 2017

+BAB VI

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya akan dibahas secara mendalam pada bagian ini. Tabel 5.28 menunjukkan bahwa pada keadaan variabel independen yang diteliti bernilai 0 (nol) maka penyerapan anggaran bernilai -16,156 atau dapat pula disimpulkan bahwa variabel/faktor lain yang tidak diteliti berpengaruh negatif dan signifikan ($\text{sig} < 0,05$) terhadap penyerapan anggaran. Pada bagian ini terdapat enam hipotesis yang merupakan hipotesis pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen.

6.1 Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis pertama pada penelitian yaitu pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan koefisien pada variabel perencanaan sebesar +0,209. Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai atau kualitas perencanaan maka penyerapan anggaran semakin meningkat. Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,209 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1% variabel perencanaan maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,209 poin. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,003 lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditetapkan yaitu 5% (0,05). Nilai t_{hitung} yang diperoleh pada Tabel 5.20 sebesar 3,057 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,998). Berdasarkan kriteria signifikan dan nilai t_{hitung} maka dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan dengan indikator visi misi, tujuan dan strategis juga penyusunan program dan anggaran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi indikator terhadap variabel perencanaan maka diketahui bahwa indikator tujuan dan strategi (0,895) merupakan indikator dominan dibandingkan visi dan misi (0,886) serta penyusunan program dan anggaran (0,846). Ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan dapat dinyatakan sangat baik sebagai indikator karena memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,80.

Goal-setting theory yang dikemukakan oleh Locke (1978) menjabarkan bahwa pencapaian tujuan (penyerapan anggaran) pada awalnya bergantung pada pemahaman individu terkait tujuan kegiatan sehingga pemahaman tersebut akan membantu meningkatkan kinerja individu. Penetapan tujuan kegiatan dan pembentukan kesepakatan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan. Hasil analisis statistik yang diperoleh sejalan dengan *goal-setting theory* dimana perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian sejalan dengan Priatno (2013) dan konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Herriyanto (2012) dan Putri (2014) yang meneliti faktor penyerapan anggaran dan menyimpulkan bahwa perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) pada institusi yang menjadi subjek penelitian mengharuskan perencanaan anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi secara tepat *output* dan *outcome* dari kegiatan yang dianggarkan. Ketidaktepatan dalam perencanaan menyebabkan program yang disusun tidak berjalan baik (Arif dan Halim, 2013) sehingga akan berdampak pada penyerapan anggaran yang disebabkan lemahnya kapasitas dan kualitas perencanaan.

6.2 Administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis kedua yang diajukan penelitian ini ialah terkait hubungan variabel administrasi dan penyerapan anggaran. Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu koefisien sebesar +0,097 yang menunjukkan bahwa variabel administrasi berkorelasi positif terhadap penyerapan anggaran. Namun nilai p yang diperoleh (0,373) lebih besar dari kriteria nilai probabilitas 5% (0,05) sehingga hipotesis kedua ditolak.

Variabel administrasi dengan indikator proses kegiatan, dokumen, sarana prasarana, serta aksesibilitas informasi administrasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Adapun indikator dominan pada variabel administrasi yaitu indikator dokumen (0,713) yang memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan proses kegiatan (0,555), sarana (0,587), dan aksesibilitas (0,664). Nilai korelasi dua indikator pada variabel administrasi (proses kegiatan dan sarana) berada pada rentang nilai yang termasuk korelasi dengan kategori cukup baik (0,41 – 0,60) sehingga perlu dievaluasi dalam penggunaannya agar dapat menjadi prediktor yang lebih baik untuk variabel administrasi.

Administrasi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan (*goal*). Hasil penelitian terkait administrasi dan penyerapan anggaran tidak sejalan dengan *goal setting theory* yang menjabarkan bahwa tujuan dan proses yang spesifik dapat mempermudah pencapaian tujuan. Hasil yang diperoleh juga kontradiksi dengan Herryanto (2012) yang menyimpulkan bahwa administrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian Anfuji (2016) bahwa administrasi merupakan faktor keempat dari lima faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Mutmainna dan Iqbal (2017) melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik kesimpulan bahwa sistem administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan terhadap kedua penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan sistem administrasi yang baik maupun buruk tidak memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Kesimpulan penelitian juga sejalan dengan temuan Priatno (2013), Putri (2014), dan Fitriany dkk. (2015). Oleh karena itu perlu pembuktian lebih lanjut terkait hubungan administrasi dan penyerapan anggaran.

6.3 Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis ketiga yang diajukan yaitu pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan koefisien variabel sumber daya manusia sebesar +0,054 yang menunjukkan adanya korelasi positif antara sumber daya manusia dan penyerapan anggaran. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,651 lebih besar dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditetapkan 5% (0,05) sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Variabel sumber daya manusia dengan indikator kompetensi, kuantitas, penugasan rangkap, dan sertifikasi/pendidikan memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Indikator dominan pada variabel sumber daya manusia yaitu kompetensi (0,692) yang memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan kuantitas (0,571), penugasan rangkap (0,654), dan sertifikasi/pelatihan (0,554). Nilai korelasi pada dua indikator (kuantitas dan sertifikasi/pelatihan) menunjukkan nilai

korelasi yang termasuk pada kategori cukup baik (0,41 – 0,60). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua indikator tersebut perlu ditinjau lebih lanjut agar dapat menjadi prediktor yang lebih baik untuk variabel sumber daya manusia.

Temuan peneliti tidak mendukung konsep sumber daya manusia pada *goal-setting theory* yaitu kompetensi dan ketepatan pemberian/pembagian kerja dapat membantu tercapainya tujuan (penyerapan anggaran). Sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi yang tinggi lebih mudah untuk mentransformasi pengetahuan dari luar untuk diterapkan di organisasi (Vega, 2007). Hasil penelitian tidak sejalan dengan temuan Harryanto (2012) dan Mutmainnah dan Iqbal (2017) bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak bergantung pada sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan karakteristik responden dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa staf yang merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 15 orang atau 21,43% dari total responden. Hal tersebut dapat menjadi kendala dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan penyerapan anggaran di mana asumsinya adalah semakin tinggi pendidikan maka proses transformasi dan implementasi pengetahuan akan lebih mudah (Vega, 2007). Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian Priatno (2013) dan Alumbida dkk. (2016) yang menemukan hal serupa bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu maka perbedaan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi untuk membuktikan lebih lanjut terkait hubungan sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.

6.4 Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis keempat yang telah diajukan pada penelitian ini yaitu terkait hubungan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran. Koefisien pada variabel pengadaan barang dan jasa diperoleh sebesar +0,608. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran sehingga semakin tinggi kegiatan pengadaan barang dan jasa maka semakin tinggi pula penyerapan anggaran. Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,608 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1% variabel pengadaan barang dan jasa maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,608 poin. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,002 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditetapkan 5% (0,05). Nilai t_{hitung} (3,273) menunjukkan nilai yang lebih besar dari t_{tabel} (1,998). Berdasarkan nilai tersebut maka hipotesis keempat diterima atau dapat disimpulkan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Variabel Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan kesesuaian peraturan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil pengujian terhadap korelasi indikator dan variabel menunjukkan bahwa indikator kesesuaian peraturan (0,711) merupakan indikator dominan dibandingkan efisien dan efektivitas (0,588) dan akuntabilitas (0,697). Indikator efektivitas merupakan indikator yang perlu ditinjau karena menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,60 sedangkan dua indikator lainnya (kesesuaian peraturan dan akuntabilitas) telah dapat dinyatakan baik sebagai indikator.

Teori *public finance* (keuangan publik) menjelaskan hubungan dan fungsi antara administrasi publik dan institusi sebagai usaha untuk memberikan pelayanan atas

kebutuhan masyarakat melalui penyusunan dan alokasi anggaran (Rossen, 2002). Pengadaan barang dan jasa ialah kegiatan yang secara spesifik menjalankan fungsi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian sejalan dengan teori tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa berhubungan secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran melalui barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro (Berica, 2010; Fitriany dkk., 2015).

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses pelelangan hingga serah terima, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Zaman dan Cristea, 2011; Putri, 2014; Ruwaida dkk., 2015). Proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip yang terdapat pada Keppres No. 54 tahun 2010 yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjamin terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang sesuai peraturan dan berlangsung secara optimal dari segi waktu sehingga penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai target.

6.5 Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis kelima yang telah diajukan yaitu pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan koefisien pada variabel komitmen organisasi sebesar +0,290. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang semakin kuat dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,290 yang diperoleh dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 1% variabel komitmen organisasi maka akan meningkatkan

penyerapan anggaran sebesar 0,290 poin. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,022 lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditetapkan 5% (0,05) dan nilai t_{hitung} (2,353) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,998) sehingga dapat disimpulkan H5 diterima bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Variabel komitmen organisasi dengan indikator *Affective commitment*, *Continuance commitment*, dan *Normative commitment* memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Indikator dominan pada variabel administrasi yaitu pada indikator *normative commitment* (0,671) yang memiliki nilai korelasi lebih tinggi dibandingkan *affective commitment* (0,609) dan *continuous commitment* (0,658). Ketiga indikator tersebut memiliki nilai di atas 0,60 sehingga dapat dinyatakan baik sebagai indikator.

Komitmen organisasi merupakan wujud keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Sopiah, 2008) dan percaya serta menerima tujuan organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). Hasil penelitian konsisten dengan teori penetapan tujuan (*goal-setting theory*) yaitu penyerapan anggaran yang tinggi sebagai tujuan institusi publik sangat bergantung pada komitmen organisasi yang tinggi dari semua anggota (Locke, 1968). Komitmen organisasi merupakan inti dari *goal-setting theory*, diharapkan dengan adanya komitmen organisasi maka proses pencapaian tujuan mulai perencanaan hingga evaluasi dapat berjalan optimal.

Kesimpulan yang diperoleh terkait hubungan komitmen organisasi dan penyerapan anggaran sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh kesimpulan serupa (Arif dan Halim, 2013; Putri, 2014; Ridani, 2015). Hasil yang diperoleh menunjukkan responden memiliki komitmen organisasi yang tinggi baik pada aspek afektif, normatif, dan kontinu (Tabel 5.8). Kondisi tersebut memudahkan anggota untuk

memahami dan berpartisipasi dalam pencapaian dan ketepatan anggaran (Locke, 1968; Indaryanto, 2008; Kusuma, 2013).

6.6 Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Hubungan regulasi dan penyerapan anggaran pada penelitian ini diajukan sebagai hipotesis keenam. Nilai koefisien pada variabel regulasi sebesar +0,544. Hubungan positif tersebut diinterpretasikan sebagai semakin tinggi nilai atau kepatuhan pada regulasi maka penyerapan anggaran semakin meningkat begitu pun sebaliknya. Berdasarkan nilai yang diperoleh dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan 1% variabel regulasi maka akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,544 poin. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,002 lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditetapkan ($5\%=0,05$) dan nilai t_{hitung} (3,179) lebih besar dari kriteria nilai t_{tabel} (1,998). Berdasarkan kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H_6) diterima atau regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Variabel regulasi dengan indikator tumpang tindih regulasi, sosialisasi regulasi dan SOP memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji korelasi indikator dan variabel menunjukkan bahwa indikator sosialisasi regulasi (0,799) merupakan indikator dominan atau indikator paling berpengaruh terhadap regulasi dibandingkan tumpang tindih (0,683) dan SOP (0,720). Ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai korelasi yang baik ($>0,60$) sehingga dapat dinyatakan baik sebagai indikator.

Kesimpulan yang diperoleh mengindikasikan bahwa kejelasan regulasi mulai dari tahap perencanaan hingga SOP atau juklak/juknis berhubungan signifikan dengan penyerapan anggaran. Temuan tersebut sejalan dengan teori institusional yang digagas oleh Max Weber dan dikembangkan W. Richard Scott *dalam* Rotich (2015) bahwa aturan

atau norma merupakan panduan berperilaku pada struktur dan fungsi organisasi terutama pada organisasi sektor publik. Penerapan regulasi diharapkan dapat mengakselerasi proses penganggaran mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban sehingga meningkatkan penyerapan anggaran sebagaimana diutarakan oleh Kaharuddin (2011) bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan aturan hukum lainnya.

Hasil penelitian mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan serupa (Arif, 2013; Solikhin, 2014;). Temuan Arif (2013) menjabarkan bahwa minimnya penyerapan anggaran disebabkan regulasi yang berubah-ubah secara cepat sehingga beberapa kegiatan penganggaran yang telah berjalan perlu disesuaikan dengan regulasi yang baru. Kondisi serupa dipaparkan oleh Solikhin (2014) bahwa menumpuknya pelaksanaan anggaran di akhir tahun disebabkan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa mengalami perubahan setiap tahun. Permasalahan regulasi tersebut kemudian diidentifikasi oleh penelitian Listiyanto (2012) yang mengemukakan bahwa lemahnya kepastian hukum dan mekanisme yang panjang pada penyelenggaraan anggaran merupakan titik lemah yang dapat menghilangnya substansi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa di mana penyelenggara anggaran hanya berfokus pada aspek administratif. Oleh karena itu diperlukan adanya payung hukum yang lebih kuat, semisal dalam bentuk Undang-Undang terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak lagi ada perubahan pada setiap tahun anggaran dan penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Perencanaan berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan *goal setting theory* bahwa pencapaian tujuan (penyerapan anggaran) pada awalnya bergantung pada pemahaman individu terkait tujuan kegiatan sehingga pemahaman tersebut akan membantu meningkatkan kinerja individu. Selain itu, penetapan tujuan kegiatan dan pembentukan kesepahaman merupakan bagian dari kegiatan perencanaan. Kesimpulan yang diperoleh memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Herriyanto (2012), Priatno (2013), dan Putri (2014) bahwa perencanaan penganggaran yang semakin baik maka akan mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran akan meningkat secara signifikan.
2. Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan *goal setting theory* terkait administrasi sebagai rangkaian proses untuk memudahkan tercapainya tujuan. Kesimpulan tersebut memperkuat temuan penelitian Priatno (2013),

Putri (2014), dan Fitriany dkk. (2015) bahwa administrasi tidak memengaruhi penyerapan anggaran secara signifikan meskipun berhubungan linear.

3. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Temuan peneliti tidak sejalan dengan *goal setting theory* terkait sumber daya manusia yaitu kompetensi dan ketepatan pemberian/pembagian kerja yang dapat membantu tercapainya tujuan (penyerapan anggaran). Kesimpulan yang diperoleh sejalan dengan hasil pengamatan empiris Priatno (2013) dan Alumbida dkk. (2016).
4. Pengadaan barang dan jasa berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses pelelangan hingga serahterima barang, berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan teori *public finance* (keuangan publik) menjelaskan hubungan dan fungsi antara administrasi public dan institusi sebagai usaha untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan masyarakat melalui penyusunan dan alokasi anggaran. Kesimpulan yang diperoleh memperkuat temuan Zaman dan Cristea (2011), Putri (2014), dan Ruwaida dkk. (2015) bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan dominan pada penganggaran sehingga penyerapan anggaran bergantung pada tingkat realisasi pengadaan barang dan jasa.
5. Komitmen organisasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian konsisten dengan teori penetapan tujuan yaitu penyerapan anggaran yang tinggi sebagai tujuan intitusi public sangat tergantung pada komitmen organisasi yang tinggi dari semua anggota (Locke, 1968). Komitmen merupakan ini dari *goal-setting*

theory, diharapkan dengan adanya komitmen organisasi maka proses pencapaian tujuan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat berjalan optimal. Kesimpulan tersebut memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh Arif dan Halim (2013), Putri (2014), dan Ridani (2015) bahwa tingginya komitmen organisasi terhadap fungsi dan tujuan organisasi maka akan memotivasi anggota bekerja optimal dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki sehingga penyerapan anggaran semakin meningkat.

6. Regulasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kesimpulan yang diperoleh mengindikasikan bahwa kejelasan regulasi mulai dari tahap perencanaan hingga SOP atau juklak/juknis berhubungan signifikan dengan penyerapan anggaran. Temuan tersebut sejalan dengan teori institusional yang digagas oleh Max Weber dan dikembangkan W. Richards Scott *dalam* Rotich (2015) bahwa aturan atau norma merupakan panduan berperilaku pada struktur dan fungsi organisasi terutama pada organisasi sektor publik. Penerapan regulasi diharapkan dapat mengakselerasi proses penganggaran mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban sehingga meningkatkan penyerapan anggaran. Kesimpulan yang diperoleh menguatkan hasil penelitian sebelumnya oleh Arif (2013) dan Solikhin (2014) bahwa menumpuknya kegiatan di akhir tahun anggaran disebabkan oleh regulasi yang berubah-ubah sehingga diperlukan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan.

7.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara keilmuan baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Pada ranah teoritis, hasil penelitian mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait penyerapan anggaran. Hasil penelitian mendukung teori institusional dan penerapan *goal-setting theory* pada setiap kegiatan penganggaran dengan mengoptimalkan peran kelembagaan dan perencanaan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Kegiatan penyerapan anggaran dapat ditinjau dari berbagai aspek selain beberapa variabel yang telah diteliti pada penelitian ini sehingga secara teoritis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran dapat teridentifikasi.
2. Pada tataran praktek, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan regulasi diharapkan dapat menjadi perhatian para pelaku penganggaran di setiap instansi publik untuk mendukung tercapainya pelaksanaan *good corporate governance*. Variabel regulasi perlu menjadi perhatian utama bagi para *stakeholder*, utamanya legislatif sebagai pembuat aturan, bahwa diperlukan kepastian hukum dengan kekuatan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan penganggaran, utamanya pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksanaan perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik.

7.3. Keterbatasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan yang disadari atau pun tidak dapat memengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain ialah sebagai berikut :

1. Responden pada penelitian merupakan para pelaku penganggaran yang cukup sibuk dan sulit ditemui untuk memberikan dan memaparkan secara detail maksud dan tujuan kuesioner sehingga peneliti memanfaatkan surat

elektronik untuk mendistribusikan kuesioner. Hal tersebut dapat menyebabkan kurang pemahamnya responden terhadap pertanyaan pada kuesioner.

2. Penggunaan instrumen kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup tidak memberikan ruang bagi responden untuk memberi pendapat di luar pertanyaan yang telah diajukan sehingga peneliti dihadapkan pada keterbatasan penjelasan atas hasil penelitian yang diperoleh.
3. Keterbatasan lain yang ditemui oleh peneliti yaitu terkait variabel Administrasi dan Sumber Daya Manusia yang indikatornya masih perlu dikaji lebih lanjut.

7.4. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperkaya instrumen penelitian yang digunakan (selain kuesioner) sehingga dapat memperoleh penjelasan yang lebih detail terkait fenomena pada topik anggaran dan memperluas jangkauan penelitian dengan subjek instansi pemerintah lain yang merupakan pelaksana APBN.
2. Pemilihan variabel yang digunakan sebagai prediktor penyerapan anggaran perlu diseleksi lebih ketat melalui pengkajian teori dan hasil penelitian terdahulu agar faktor-faktor yang diteliti dapat memberi kontribusi lebih bermakna pada permasalahan penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamy., M. 2010. Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe : *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol. 8 No. 4
- Ali., Faried Ali, 2012. *Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintahan*, Bandung: Aditama.
- Alumbida, Saerang, Ilat 2016. Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Komitemen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten KepulauanTalaud. Program Pasca Sarjana Unsrat, Manado dari <http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Arif, E. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Program Pasca Sarjana* UGM, Yogyakarta.
- Arif, E. dan A. Halim. 2013. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XVI* Manado, 25-28.
- Alfit, D. Eleminafe. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Ndao Tahun 2009-2013. *Program Pasca Sarjana* UGM, Yogyakarta.
- Albulescu, C.T., dan Goyean, D. 2013. EU Funds Absorption Rate And The Economic Growth. *Timisoara of Economics And Business*, vol. 6 no. 20:153-17.
http://www.tjeb.ro/index.php/tjeb/article/download/TJEB20_153to170/pdf.
- Amirudin. 2009. Faktor Yang Menyebabkan Minimnya Serapan Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Bengkalis
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga. Jakarta.
- Carsidiawan, Didi., 2008. Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. Tersedia di, <http://didi.carsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnyapenyserapan-anggaran-belanja-pemerintah/>, diakses pada 05 Agustus 2014.
- Di Maggio, P.J. dan W.W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review* 48(2): 147-160.
- Faizzah., Nur. dan Mildawati., Titik. 2007. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan variabel pemoderasi gaya

kepemimpinan dan komitmen organisasi pada pemkot surabaya. Diakses pada 12 Oktober, 2011 dari <http://www.google.com>

- Fitriani., N. Masdjojo G.N, Suwarti. T. 2015. Exploring The Factors That Impact The Accumulation of Budget Absorption In The end of The Fiscal Year 2013: A Case Study in Pekalongan Cyti Of Central Jaya Indonesia. *South Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 3 (Aug.)ISSN 2289-1560.
- Glenngard, A.H. dan T. M. Maina. 2007. Reversing The Trend of Weak Policy Implementation in The Kenyan Health Sector? A Study of Budget Allocation and Spending of Health Resources Versus Set Priorities. *Health Research and System*, 5, 3.BioMed Central.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: BadanPenerbit, Universitas, Dipenogoro.
- Gie., T. Liang. 1980. *Administrasi Perkantoran Modern*. Cetakan ke-10. Penerbit Nur Cahaya, Yogyakarta, 217.
- Handaya Ningrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herriyanto, H. 2012. Analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keterlabatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di ilayah Jakarta. Tesis. *Tidak Dipublikasikan*. Jakarta:FEUI.
- Hovart, A. 2005. Why Does Nobody Care about The Absorption?. *WIFO Working Paper*. No. 258. Vienna.
- Indaryanto, Adrir. 2008. Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Apprentices di Institut Pengembangan Nemangkawai Timika – Papua. Teses. *Tidak Dipublikasikan*. Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta.
- Indriantoro., Nurdan. dan Bambang., Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, EdisiPertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jaelani, Aan. 2015. Pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan keuangan publik Islam. International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES) 02-03 November 2015. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Juliani, Dian. 2014. Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. skripsi. Yogyakarta: FE UGM.
- Kanti., Karani. 2015. Evaluasi keefektifan penyerapan anggaran (studi pada kantor imigrasi kelas I Yogyakarta. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

- Kaharuddin, 2012. Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja daerah di Kab. Sumbawa . *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Kusuma, I Gede Eka Arya. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris di SKPD Pemerintah Provinsi Bali)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana: Bali. Tidak Dipublikasikan
- Kuswoyo,. I. D. 2012. Analisis atas Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri).Tesis. *Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Politeknik Pariwisata.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Universitas Hasanuddin.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau laporan triwulan tahun 2011-2015, Kopertis Wilayah IX Sulawesi.
- Latham, G. P., Borgogni. L., dan Petitta. L. 2008. Goal Setting and Performance Manajement in The Public Sector. *International Publik Manajement Journal*, Vol. 26, No. 3, Hal : 385-403.
- Latuheru., Belianus Patria. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kawasan Industri Maluku), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, FEU Kristen Petra, 117-130.
- Locke, E. A. 1968. Toward a theory of taks mofi-vation and incentives. *Organizationan Beha-vior and humanPerformance*, 3. 157-189.
- Mathis., Robert L. dan Jackson., H. 2006. *Human Resource Management*, Ahli Bahasa. Salemba Empat. Jakarta

- Manasan., Rosari G., dan Mercado., Reben G. 2001. An Assessment of The Absorptive Capacity Of Agencies Involved In The Publik Works Sector. Philippine Institute For Developmen Studies, *Discussion Paper Series No. 2001-17*. <http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps01117.pdf>.
- Miliasih, 2012. Analisis keterlambatan penyerapan anggaran di belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2010 di wilayah pembayaran KPPN Provinsi Pekanbaru.
- Mowday, R.T., Porter LW., dan Steers, R.M., 1979, *Employee-Organizational Linkages : The Psychology Of Commitment, Absenteeism And Turnover*: Academic Press, New York.
- Nawawi. 2001. *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Yogyakarta: GM University Press.
- Noviwijaya., A. Dan Rohman., A. 2013. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.
- Nugroho. 2013. Faktor-faktor yg memengaruhi penyerapan anggaran setker di KPPN Blitar dgn analisis faktor dan regresi logistik
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres No. 04 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2015 tentang Tata Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, 2015
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.05/2010 tentang pengelolaan kelebihan/kekurangan Kas Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
- Priatno., A.P. 2013. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

- Putri., C. T. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bengkulu.
- Ridani., M. Arsyad. 2014. Analisis penyerapan anggaran bekanja daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2009-2013. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Robbins., Stephen. Dan Coutler., Mary. 2002. *Manajemen*, Jakarta: Gramedia
- Rossen, Harvey S. dan Ted Gayer. 2008. *Public Finance*. New York: McGraw-Hill
- Rossen, Harvey S. 2002. Public Finance: *Essay for the Encyclopedia of Public Choice*. Princeton University. CEPS Working Paper No. 80.
- Selznick, Philip. 1948. *Foundations of the Theory of Organization*. American Sociological Review 13(1): 25-35.
- Shah, Robinson and Fabozzi. 2007. *Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Public Sector and Governance and Accountability Series: Local Budgeting*. World Bank.
- Solikhin. 2014. Kecenderungan penumpukan belanja pemerintah pusat di akhir tahun anggaran dan mengeksploitasi faktor-faktor penyebab pada satker di Wilayah KPPN Purwokerto.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*, Andi, Yogyakarta.
- Sudjana, Nana. 2008. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja.
- Sugiyano. 2009. *Metoda Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. CV. Alfabet. Bandung
- Sukardi, 2012. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- Sulaiman, A.S., Hamzah. A.P., dan Priyanto, R. 2012. Penyerapan anggaran di kementerian keuangan RI dan faktor yang memengaruhi. *Jurnal BPPK*, volume 4 tahun 2012
- Susanto, Heru. 2006. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam mewujudkan Good Governance. *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2(1): 1-15.
- Syakhroza, Akhmad. 2008. Telaah Governance Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Usahawan*, (No. 05) TH XXXXVI : 37-40.

Tatar, M. 2010. Estonia Local Government Absorption Capacity of European Union Structural Funds. *Halduskultuur-Administrative Culture* 11 (2), 202-226. Tersedia di,
<http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=estonia+ local+ Government+ Absorption+ Capacity+ of+ european+ union+ structural+ funds&btnG=Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara>.

Undang-Undang RI Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Vega, J. (2007). An Analytical Model of Absorptive Capacity. *Paper to be Presented at The Druid Summer Conference on Appropriability, Proximity, Routines and Innovation*. Copenhagen: Denmark.

Wahyuni, Rizka, Rasuli dan Doyanto. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *JOM FEKOM* Vol. 1 No. 2

Widjaja, H.A.W. 1987. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zaman., G. and Cristea., A. 2011. *EU Structural Funad Absorptoon in Romania: Obstacles And Issues. The journal of economic literature (JEL)* Classification E22; F36; O19; O47. <http://www.revecon.ro/articles/2011-1/2011-1-4.pdf>.

.....<http://aripple.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-procurement-pengadaan-barang.html>.

LAMPIRAN 1 Input Data

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	4	4	5	5	3	5	4	3	5
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	2	4	3	4	4
4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	2	4	5	4	4	4	5	4	5	5	3	5
5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	4	3	5	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	2	3	3	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	5	5	3	5
5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	3	2	4	4	4	4	4	5	2	4	4	3	5
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	2	5

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	2	4	3	3	4	
4	4	3	4	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	3	5	5	3	5	
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	2	2	3	4	3	4	
4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	3	5	
5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	5	3	4	
4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	1	4	2	3	4	
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	3	5	
5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	3	4	
4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	1	3	3	3	4	
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	5	
5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	5	3	5	

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	5	
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	5	3	5	
5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	1	3	3	3	4	
5	5	4	5	4	5	5	5	3	5	3	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	5	3	4	
4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	2	4	4	2	4	
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	4	3	4	
4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	5	2	4	
5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	2	4	
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	3	4	
4	4	3	5	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	3	5	
5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	3	5	5	2	5	
5	5	5	5	4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	3	4	4	5	5	4	3	5	5	3	5	
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	2	5	
4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	1	3	3	3	4	
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	1	4	3	2	4	
4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	
5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	3	4	
5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	3	5	5	3	4
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	3	5	

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	3	5	
4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2	5	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	2	4	3	3	4	
4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	2	5	4	3	4	
5	4	3	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	2	4	
4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	4	
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	2	5	5	4	3	5	5	3	4	
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	3	5	5	3	5	
4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	3	5	
4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	3	5	5	3	5	

X1					X2				X3				X4				X5						X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5	5	5	4	3	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	4	5	3	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2	3	5	2	4	
5	5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	3	4	
5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	3	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3	4	
5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	1	3	3	2	4	
4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	4	3	4	
5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	5	
5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	2	5	
5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	
5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	
5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	3	4	5	5	3	3	5	4	4	4	

X1					X2				X3				X4				X5					X6			Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	3	5	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	2
5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	5	3	3	4
5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3

Lampiran 2 Uji validitas dengan korelasi pearson

Perencanaan - X1

		X1
x1q1	Pearson Correlation	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x1q2	Pearson Correlation	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x1q3	Pearson Correlation	,752**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x1q4	Pearson Correlation	,715**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x1q5	Pearson Correlation	,593**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Administrasi - X2

		X2
x2q1	Pearson Correlation	,701**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x2q2	Pearson Correlation	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x2q3	Pearson Correlation	,661**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x2q4	Pearson Correlation	,715**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Lanjutan Lampiran 2

Sumber daya manusia – X3

		X3
x3q1	Pearson Correlation	,763**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x3q2	Pearson Correlation	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x3q3	Pearson Correlation	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x3q4	Pearson Correlation	,654**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Pengadaan barang dan jasa – X4

		X4
x4q1	Pearson Correlation	,570**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x4q2	Pearson Correlation	,756**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x4q3	Pearson Correlation	,727**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x4q4	Pearson Correlation	,663**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Lanjutan Lampiran 2

Komitmen organisasi – X5

		X5
x5q1	Pearson Correlation	,753**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x5q2	Pearson Correlation	,506**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x5q3	Pearson Correlation	,642**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x5q4	Pearson Correlation	,747**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x5q5	Pearson Correlation	,313**
	Sig. (2-tailed)	,008
	N	70
x5q6	Pearson Correlation	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Regulasi – X6

		X6
x6q1	Pearson Correlation	,808**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x6q2	Pearson Correlation	,881**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
x6q3	Pearson Correlation	,861**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Lanjutan Lampiran 2

Y – Penyerapan anggaran

		Y
yq1	Pearson Correlation	,875**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
yq2	Pearson Correlation	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70
yq3	Pearson Correlation	,802**
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	70
yq4	Pearson Correlation	,176**
	Sig. (2-tailed)	,146
	N	70
yq5	Pearson Correlation	,517**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	70

Lampiran 3 Uji reliabilitas

X1 – Perencanaan
Administrasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,743	5

X3 – Sumber daya manusia
Pengadaan barang dan jasa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,674	4

X5 – Komitmen organisasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,632	6

Y – Penyerapan anggaran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,799	4

X2

–

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,640	4

X4

–

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,615	4

X6

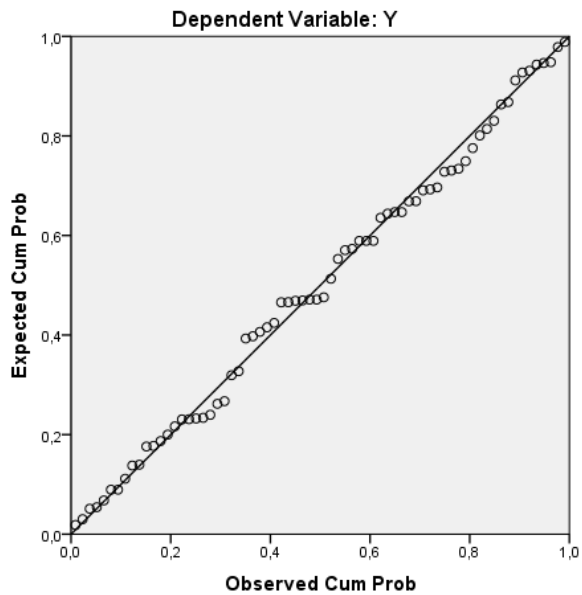
- Regulasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,804	3

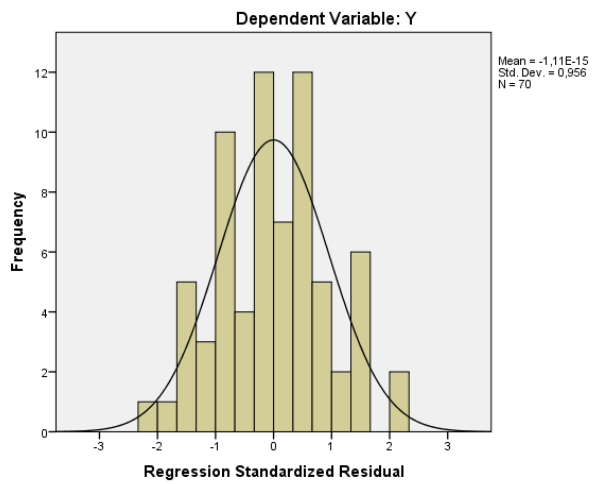
Lampiran 4 Asumsi klasik

Grafik normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



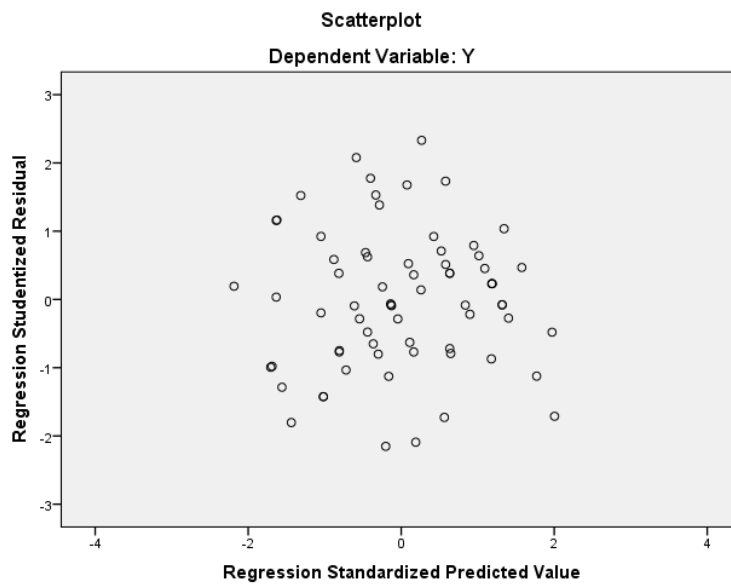
Lanjutan Lampiran 4 Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
X1	,657	1,523
X2	,581	1,721
X3	,452	2,215
X4	,268	3,732
X5	,403	2,479
X6	,249	4,017

a. Dependent Variable: Y

Heterokedastisitas



Lampiran 5 Koefisien determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,920 ^a	,846	,831	,92253

a. Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X2, X5, X4

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 6 Hasil analisis regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16,156	2,279		-7,090	,000
	X1	,209	,068	,187	3,057	,003
	X2	,097	,108	,058	,898	,373
	X3	,054	,118	,033	,455	,651
	X4	,608	,186	,313	3,273	,002
	X5	,290	,123	,183	2,353	,022
	X6	,544	,171	,315	3,179	,002

a. Dependent Variable: Y



**KEMENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Printis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar 90245
Telpn. (0411) 585415, 583678 Fax. (0411) 587218
Email : feunhas@indosat.net.id

Yth. Bapak/Ibu/Sdr
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusun tugas akhir (tesis), bersama ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi responden dalam penelitian yang saya lakukan (angket terlampir).

Angket ini ditujukan untuk diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Saya mengharapkan jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan nantinya adalah jawaban obyektif agar diperoleh hasil maksimal. Perlu diketahui bahwa jawaban yang diberikan tidak akan mempengaruhi status dan jabatan Bapak/Ibu/Sdr, hanya jawaban yang obyektif dan realistislah yang saya perlukan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penyerapan anggaran pada satker Bapak/Ibu/Sdr. Adapun judul penelitian ini adalah "**Analisis Penyerapan Anggaran di PTN dan Kopertis Makassar**". Berikut lampiran data dari peneliti:

Nama	: Alimuddin
NPM	: P3400214403
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian serta partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih

Makassar, September 2017

Hormat saya,

Alimuddin
NPM P3400214403

A. Identitas Responden

Mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia mengisi daftar isian berikut dengan cara menjawab atau menyilang salah satu yang tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Nama :
2. JenisKelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembantu Direktur II/Pembantu Rektor II, (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Bendahara Pengeluaran, Kasubag. Keuangan, Ka. Bagian Perencanaan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), panitia pengadaan barang dan Jasa, dan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan)
4. LamaBekerja : Tahun
5. Pendidikan : (S3, S2, S1, Diploma,SLTA,Lainnya)*
6. Bid. Pendidikan :
7. Satuan Kerja :
8. Alamat Email* :

B. Petuniuk Menjawab

1. Mohon dengan hormat untuk menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr, dengan cara memberi tanda (X) atau (√) pada kotak jawaban yang anggap sesuai.
2. Berikut ini disajikan pernyataan dengan lima kategori pilihan :
 - STS : Sangat Tidak Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - KS : Kurang Setuju
 - S : Setuju
 - SS : Sangat Setuju

A. PERENCANAAN – X1

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
	Tujuan dan strategi					
1	Instansi/organisasi memiliki dokumen perencanaan jangka panjang yang menjabarkan visi dan misi instansi/organisasi					
2	Dokumen perencanaan memuat kinerja yang terukur dan pendanaannya					
	Penyusunan program dan anggaran					
3	Rencana kerja dan anggaran (RKA) disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan pagu anggaran					
4	Penyusunan rencana kerja dan anggaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas					
5	Pelaksanaan program sinkron dengan kinerja eksekutif					

B. ADMINISTRASI – X2

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi administrasi

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
	Pengarsipan					
1	Instansi/organisasi memiliki bidang khusus mengerjakan administrasi					
2	Dokumen kegiatan instansi/organsasi (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dicatat dan diarsipkan					
	Sarana administrasi					

3	Proses administrasi memanfaatkan sistem informasi					
Aksesibilitas informasi administrasi						
4	Informasi kegiatan instansi/organisasi dapat diakses					

C. SUMBERDAYA MANUSIA – X3

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi sumberdaya manusia.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
	Kompetensi					
1	Sumberdaya manusia di instansi/organisasi bekerja sesuai bidang keahlian masing-masing					
	Kuantitas					
2	Jumlah sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi					
	Penugasan rangkap					
3	Setiap individu memiliki <i>job description</i> sehingga terhindar dari penugasan rangkap					
	Sertifikasi dan pendidikan					
4	Instansi/organisasi menyediakan fasilitas untuk pegawai yang akan mengikuti pelatihan/sertifikasi					

D. PENGADAAN BARANG DAN JASA – X4 (Ledy S.G, Jullie JS. 2016)

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi proses lelang/pengadaan barang dan jasa.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
	Jumlah Pejabat/Panitia Pengadaan Barang					

1	Kurangnya kemampuan pegawai sebagai panitia/pejabat pengadaan barjas karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima					
2	Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat banyaknya pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi					
Pemahaman Peraturan						
3	Realisasi anggaran pengadaan barjas dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai					
4	Pengadaan barjas dilaksanakan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010					
Pembentukan Struktur Organisasi						
5	SDM Pelaksana Pengadaan barjas yang bersertifikat kurang					
6	SK Panitia terlambat ditetapkan					
Penentuan HPS						
7	Penyusunan Pagu Anggaran terlalu rendah (Tidak sesuai dengan harga pasar)					
Pemilihan Penyedia Barja						
8	Pemeriksaan dan penandatanganan dokumen kontrak oleh panitia/pejabat pengadaan membutuhkan waktu yang lama					

E. KOMITMEN ORGANISASI – X5

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
<i>Affective commitment</i>						
1	Saya merupakan bagian keluarga dari instansi/organisasi tempat saya bekerja					
2	Saya merasa bahagia menghabiskan karir di instansi/organisasi ini					
<i>Continuance commitment</i>						
3	Saya sulit meninggalkan instansi/organisasi karena takut tidak mendapatkan kesempatan kerja di tempat lain					
4	Instansi/organisasi ini telah berjasa bagi hidup saya					
<i>Normative commitment</i>						
5	Instansi/organisasi ini layak mendapatkan kesetiaan saya					
6	Eksekutif institusi/organisasi rutin melakukan koordinasi					

F. REGULASI – X6

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi regulasi.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
<i>Tumpang tindih regulasi</i>						
1	Peraturan yang diterapkan pada organisasi/institusi tidak tumpang tindih					
<i>Sosialisasi regulasi</i>						
2	Institusi/organisasi akan menggelar sosialisasi apabila terdapat regulasi baru yang akan diterapkan					

	SOP					
3	Institusi/organisasi menyusun sistem operasional prosedural (SOP) untuk setiap program/kegiatan					

G. PENYERAPAN ANGGARAN – Y (Ledy S.G, Jullie JS. 2016)

Tunjukkan sejauhmana Bapak/Ibu setuju dengan pernyataan di bawah terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran.

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penarikan anggaran sangat proporsional setiap triwulannya					
2	Pada akhir tahu terjadi penumpukan pekerjaan terkait dengan penyelesaian proses pencairan					
3	Realisasi untuk penyerapan anggaran pekerjaan terkait (program dan Kegiatan) tidak pernah mencapai 95%					
4	Mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95%					
5	Pada akhir tahun memiliki sisa anggaran					

Keterangan:

Apabila Bapak/Ibu/sdr mengalami masalah dalam hal menjawab karena tidak memahami maksud pertanyaan tersebut, maka silahkan menghubungi saya di : 0823 4477 1145 atau 0853 4224 338 atau Vie email : alimuddin.poliupg@gmail.com